

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN DAERAH TAHUN 2016**



Disusun Oleh:

Nama : Choirul Ikhwan

NIM : 20140520127

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Dengan Judul:

**KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN
DAERAH TAHUN 2016**

Oleh:

**CHOIRUL IKHWAN
20140520127**

Skripsi ini telah Dipertahankan dan Disahkan di depan Dewan Penguji Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada:

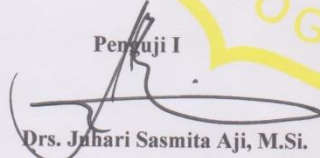
Hari / Tanggal : Rabu, 25 April 2018
Tempat : Ruang Ujian Ilmu Pemerintahan
Waktu : 08.00-09.00 WIB

SUSUNAN TIM PENGUJI

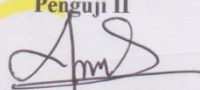
Ketua Tim Penguji


Dr. Suswanta, M.Si.

Penguji I

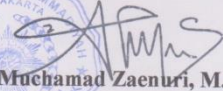

Drs. Juhari Sasmita Aji, M.Si.

Penguji II


Sakir, S.IP., M.IP.

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.



LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Dengan Judul:

**KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN
DAERAH TAHUN 2016**

Oleh:

**CHOIRUL IKHWAN
20140520127**

Skripsi ini telah Dipertahankan dan Disahkan di depan Dewan Penguji Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 25 April 2018
Tempat : Ruang Ujian Ilmu Pemerintahan
Jam : 08.00-09.00 WIB

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji

Dr. Suswanta, M.Si.

Penguji I

Drs. Juhari Sasmita Aji, M.Si.

Penguji II

Sakir, S.IP., M.IP

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Choirul Ikhwan

Nomor Induk Mahasiswa:20140520127

Program Studi : S1 Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya ini yang berjudul “**KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAERAH TAHUN 2016**” merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan bukanlah karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh orang lain. Adapun karya atau pendapat orang lain yang sengaja dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Yogyakarta, 8 Maret 2018

Penulis,

Choirul Ikhwan

Motto

*“Berusaha dan yakinlah pada kemampuan dirimu sendiri,
maka kesuksesan akan datang kepadamu.”*

(Choirul Ikhwan)

*“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai
dengan kesanggupannya.”*

(Q.S. Al-Baqarah-286)

*“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah
diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak
akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi
balasan kepadanya dengan balasan yang paling
sempurna.”*

(An-Najm 39-41)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya berupa skripsi ini kepada :

1. Mama dan almarhum Bapak tercinta, karena atas doa, semangat, kasih sayang kalian tiada henti, beserta pelajaran hidup yang kalian berikan, yang akhirnya dapat membuat saya berada pada titik ini. Terkhusus kepada almarhum bapak, walaupun bapak sudah tidak bersama saya lagi, tetapi rasa kasih sayang yang bapak berikan selalu terikat dalam diri ini.
2. Kakak-kakak ku tercinta Mba Sari dan Mas Dayat yang selalu memberikan doa, dukungan, serta nasihat tiada henti dalam proses kuliah ini.
3. Keponakan tersayang Zalfa, Khanza, Alif, dan Sakha yang menjadi salah satu alasan ku untuk selalu tersenyum dan tertawa dengan tingkah laku mereka yang lugu.
4. Permata hatiku Archi Qurotta Aini Nissa yang tiada hentinya memberikan rasa kasih sayang, perhatian, doa, semangat di tiap-tiap hariku, dan sebagai penyemangat dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu mengabulkan segala keinginan kita.
5. Keluarga besar H. Nurdin di Pangkalan Bun dan keluarga besar H. Muchroji di Magelang yang selalu memberikan motivasi, dorongan serta doa dalam disegala kegiatanku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan doa, dukungan, serta semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini :

1. Mama tercinta karena tanpa doa, nasihat, dukungan yang selalu di berikan selama ini proses pembuatan skripsi, mungkin saya tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan maksimal.
2. Mba Sari dan Mas Dayat selaku kakak-kakak ku tercinta, terima kasih atas doa dan semangat yang selalu kalian berikan kepadaku selama ini.
3. Permata hatiku Archi Qurotta Aini Nissa yang tiada hentinya memberikan rasa kasih sayang, perhatian, doa, semangat di tiap-tiap hariku, dan sebagai penyemangat dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
4. Kak Jasepa dan Bang Oky yang selalu memberikan masukan serta pelajaran dalam mengerjakan skripsi ini agar baik.
5. Mas Sakir, S.IP., M.IP dan Klinik Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selalu memberikan saran serta pengetahuan tentang cara penulisan skripsi yang baik dan benar.
6. Budi dan Fiani, terima kasih karena kalian sudah mau menemaniku kemana-mana saat melakukan penelitian dan selalu mau direpotkan oleh aku.
7. Akbar, Riyan, Chairullah, Hendro, Umam, Edho, Haidar, Rio, Kiki dan kawan-kawan tongkrongan di parkir an Fisipol sahabat seperjuangan dalam proses perkuliahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan yang lain yang tidak dapat saya

sebutkan satu persatu. Ayok boys kita sukses sama-sama.

8. Dan kawan-kawan seperjuangan Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2014 yang saya sayangi, serta pihak lainnya yang penulis tidak bisa cantumkan satu persatu.
9. Semua kawan-kawan Pengurus dan Anggota IKPM Kotawaringin Barat di Yogyakarta yang saya banggakan. Yang senantiasa memberikan suka dan duka dalam memajukan Kabupaten Kotawaingin Barat di tanah Yogyakarta ini. Terima kasih atas segala pelajaran yang saya dapat dalam berorganisasi ini.
10. Kawan-kawan kontrakan Godean squads Amy, Ical, Irfan, Rio, Yogi, Wanda, Heri, Heru, Robi, Sihu, Lebon. Terima kasih sudah memberikan tawa dengan canda kalian yang khas.

TERIMA KASIH BANYAK SEMUANYA~

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat, taufik, karunia dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAERAH TAHUN 2016”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan dalam proses penelitian ini terjadi pergantian nama Dinas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 yang sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir Gunawan Budiarto, M.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Dr. Suswanta, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing saya agar skripsi ini dapat diselesaikan

dengan baik.

5. Bapak Drs. Juhari Sasmita Aji, M.Si. selaku Dosen Penguji I yang telah menguji dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Mas Sakir, S.IP., M.IP selaku Dosen penguji 2 yang telah memberikan masukan serta penilaian dalam pembuatan skripsi ini agar menjadi lebih baik.
7. Seluruh dosen dan staf Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mengajarkan banyak ilmu dan membantu selama menempuh perkuliahan.
8. Para narasumber Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dan Masyarakat Kecamatan Kotawaringin Lamayang bersedia meluangkan waktu dalam proses pengumpulan data.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara perseorangan yang telah memberikan doa dan dukungannya.

Dengan senantiasa mengharapkan ridho Allah SWT. penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk segala pihak.

Wa'alaikumsalam Wr.Wb

Yogyakarta, 08 Maret 2018

Penulis,

Choirul Ikhwan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
SINOPSIS.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Kerangka Dasar Teori.....	15
1. Kinerja	15
a. Pengertian Kinerja	15
b. Kinerja Organisasi Publik.....	17
c. Pengukuran Kinerja	19
d. Indikator Kinerja.....	22
2. Pembangunan.....	25
3. Infrastruktur	28
a. Pengertian Infrastruktur	28
b. Jenis Infrastruktur	31
F. Definisi Konsepsional.....	33
G. Definisi Operasional	33
H. Metode Penelitian	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Jenis dan Sumber Data.....	35
3. Lokasi Penelitian.....	36
4. Teknik Pengumpulan Data.....	36
5. Teknik Analisis Data	38
6. Rencana Sistematika Penulisan	39

BAB II	DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	41
	A. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.....	41
	B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kotawaringin Barat.....	47
BAB III	KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAERAH TAHUN 2016.....	57
	A. Produktivitas	58
	B. Kualitas Pelayanan.....	64
	C. Responsivitas	72
	D. Responibilitas.....	76
	E. Akuntabilitas	83
BAB IV	PENUTUP	89
	A. Kesimpulan	89
	B. Saran-saran	91
	DAFTAR PUSTAKA	93
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah.....	10
Tabel 2.1 Daftar Kecamatan Dan Ibukota Kecamatan Serta Jumlah Desa Atau Kelurahan	42
Tabel 2.2 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi	48
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Pelayanan Umum Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016.....	66
Tabel 3.2 Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Di Daerah Perkotaan Dan Perdesaan.....	77
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sejak Tahun 2012-2016 Dalam Laporan Akuntabilitas	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pelayanan Yang Diberikan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Untuk Masyarakat	69
--	----

SINOPSIS

Infrastruktur jalan mempunyai fungsi yang begitu penting dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi rakyat dalam memenuhi kebutuhan primer atau sekunder, baik untuk penyaluran barang maupun jasa bagi kehidupan masyarakat. Tetapi permasalahan tersebut bertolak belakang dengan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat. pembangunan jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak kunjung selesai sejak dimulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2017. Dimana peran Dinas Pekerjaan Umum sangat penting dalam pembangunan Infrastruktur, Namun sebaliknya, Dinas Pekerjaan Umum sendiri belum mencapai tujuan organisasi tersebut yang bersangkutan dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri yang mana Infrastruktur tersebut tidak kunjung selesai sampai saat ini.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Daerah Tahun 2016. Yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja dinas pekerjaan umum dalam pembangunan jalan daerah dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah kajian pengetahuan tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam pembangunan jalan daerah dan sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana kinerja suatu organisasi perangkat daerah yang baik dan sesuai aturan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan sumber data kualitatif yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dalam teknik analisis data peneliti menggunakan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Kinerja yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pembangunan infrastruktur jalan daerah pada tahun 2016 telah berjalan sesuai dengan apa yang di inginkan. Kinerja dari segi produktivitas dapat dilihat bahwa peningkatan kondisi jalan setiap tahunnya meningkat dan mencapai yang dihasilkan dari pembangunan jalan Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama sangat besar. Dalam kualitas pelayanan dapat dilihat dari upaya pelayanan dalam peningkatan kondisi jalan terus menerus setiap tahunnya terhitung dari tahun 2011-2016 periode akhir RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi lebih baik. Dalam responsivitas pihak Dinas Pekerjaan Umum selalu tanggap untuk melakukan tindakan agar jalan tersebut dapat dilalui oleh masyarakat. Dalam reponabilitas dapat dibuktikan bahwa dalam melaksanakan pembangunan jalan sudah mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dan dalam akuntabilitas dapat dibuktikan bahwa selalu memberikan laporan setiap tahun kepada pihak pengawas telah dan dengan memasang papan informasi disepanjang jalan dari pangkalan bun ke kotawaringin lama. Dari semua indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan jalan daerah khususnya jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin lama secara baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Harapannya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat lebih serius dan cepat dalam menangani pembangunan jalan dari Kotawaringin Barat menuju Kotawaringin Lama. Karena jalan ini merupakan salah satu akses untuk mensejahterakan masyarakat dalam melakukan segala aktivitasnya, meningkatkan perekonomian Daerah, dan memudahkan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Kinerja, Pembangunan, Infrastruktur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Infrastruktur merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatnya perekonomian suatu Negara maupun Kota. Apabila Infrastruktur Jalan dari Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Kecamatan Kotawaringin Lama baik, maka akan maju suatu perekonomian sebuah Kota, namun apabila Infrastruktur ini tidak baik, maka perekonomian pun akan berdampak pula tidak baik. Tersedianya akses transportasi yang layak dan baik sangat berperan untuk lancarnya arus lalu lintas. Meningkatnya perkembangan lalu lintas akibat pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan permasalahan yang signifikan jika tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas dari Infrastruktur jalan yang tersedia. Pertumbuhan transportasi yang sangat pesat berpengaruh pada padatnya lalu lintas, sehingga diperlukan adanya perbaikan jalan yang menunjang pada tingkat kualitas yang baik dan berstandar.

Infrastruktur jalan juga mempunyai fungsi yang begitu penting dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi rakyat dalam memenuhi kebutuhan primer atau sekunder, baik untuk penyaluran barang maupun jasa. Adanya akses jalan yang bagus sangat berperan terhadap kemudahan dalam berlalu lintas. Membahas tentang pembangunan Infrastruktur, memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya untuk membuka batas-batas wilayah, memudahkan jalur dibidang ekonomi,

sosial budaya namun untuk meningkatkan kemudahan menyelesaikan tugas-tugas dibidang pemerintahan dan pelayanan umum. Karena pembangunan Infrastuktur belum dilaksanakan secara penuh, maka usaha pertumbuhan kemakmuran masyarakat di suatu Daerah belum dapat terpenuhi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur mendefinisikan Infrastuktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Hal ini bergantung pula pada suatu Kota yang dimana pihak Pemerintah atau yang bersangkutan terhadap Infrastuktur ini peduli akan pentingnya Infrastuktur tersebut untuk kemajuan Kota. Karena pada dasarnya suatu Daerah maju dalam bidang ekonomi, sosial, budaya merupakan faktor dari tersedianya Infrastuktur jalan yang memadai. Apabila Infrastuktur dari Daerah tersebut sangat unggul, maka Daerah semakin maju dan berkembang.

Menurut Kodoatie (2005), Infrastuktur sebagai pendongkrak utama sektor sosial dan sektor ekonomi dilakukan dalam suatu hal keselarasan dan menyeluruh. Infrastuktur yang menjadi sarana yang dapat mengembangkan kegunaan Pemerintah dalam hal melayani masyarakat ini tidak dapat berjalan apabila terpisah. Keselarasan itu menentukan hasil keseluruhan pelayanan Infrastuktur tersebut. Infrastuktur ini juga akan berkembang pesat apabila dari

Pemerintah sendiri dapat melaksanakan kegiatan pembangunan Infrastruktur dengan serius. Karena dampak dari pembangunan ini akan dirasakan oleh publik.

Pembangunan suatu Infrastruktur di daerah tak lepas dari peran Pemerintah dan Instansi terkait yang mengelola pembangunan Infrastruktur tersebut dari proses perancangan sampai ke proses pembangunan selesai. Tentu saja Pemerintah maupun Instansi yang mengelola pembangunan Infrastruktur ini terdapat kinerja yang menjadi acuan berhasil atau tidaknya pembangunan infrastruktur tersebut. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah tumpuan perubahan dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah, masyarakat menganggap belum berhasil memberi hasil yang besar dalam menumbuhkan kinerja birokrasi. Keadaan seperti ini seharusnya dapat menjadi evaluasi bagi Pemerintah maupun Instansi dalam meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi.

Tetapi permasalahan tersebut bertolak belakang dengan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat. Dimana di Kabupaten ini terdapat suatu permasalahan Infrastruktur Jalan yang menghubungkan antara Pusat Kota Kabupaten Kotawaringin Barat dengan salah satu Kecamatan, yaitu Kecamatan Kotawaringin Lama yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut. Padahal akses jalan tersebut begitu sangat penting bagi Masyarakat Kotawaringin Barat untuk menuju ke Kecamatan bahkan juga untuk menuju ke Kabupaten lainnya

dan juga sangat penting sebagai jalur perekonomian Kabupaten agar lebih meningkat.

Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang jalan mendefinisikan jalan ialah sebagai bagian sarana dan prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal ini sangat dirugikan oleh masyarakat yang menggunakan jalan antara Kabupaten menuju ke Kecamatan tersebut, karena jalan yang di harapkan dari warga Kecamatan Kotawaringin Lama sebagai akses menuju ke pusat Kota Kabupaten Kotawaringin Barat ini tidak kunjung selesai pembangunannya sejak dimulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2017. Jalan ini sempat selesai dan sempat juga dilalui oleh warga Kabupaten Kotawaringin Barat maupun warga Kecamatan Kotawaringin Lama. Namun hanya beberapa tahun saja, karena apabila saat hujan turun, jalan ini akan mengalami becek yang luar biasa dan dapat tergenang air luapan dari rawa dengan kedalaman 60cm atau di batas lutut kaki orang dewasa. Banyak warga yang merasa dirugikan dengan tidak kunjung selesainya proyek pembangunan jalan yang menghubungkan antara Kecamatan menuju ke pusat kota Kabupaten. Faktor ini yang membuat jalan tidak dapat di akses oleh kendaraan apapun.

Apabila dipaksakan, kendaraan-kendaraan yang melalui jalan ini akan mengalami kerusakan pada mesin dan bahkan dapat terperosok ke dalam kubangan tanah yang menjadi lumpur.

Tentu saja dengan perbaikan Infrastruktur jalan yang tidak kunjung selesai tersebut sangat merugikan masyarakat yang menggunakan jalan dari Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Kecamatan Kotawaringin Lama. Apalagi bagi masyarakat yang memang benar-benar menjadikan jalan tersebut sebagai jalur utama mereka mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Karena jalan ini adalah jalur penghubung antara Kabupaten Kota ke Kecamatan, kemudian penghubung ke Kabupaten tetangga dan bahkan sebagai penghubung ke Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Ririn Nirmalasari sebagai pengguna jalan dari Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Kecamatan Kotawaringin Lama dan sebagai salah satu Aparatur Sipil Negara yang bertugas di bidang kesehatan di Kecamatan Kotawaringin Lama mengaku sangat dirugikan dalam pembangunan Infrastruktur jalan yang tidak kunjung selesai ini. Hal yang dirugikan dari bidang kesehatan, apabila saat jalan banjir dan berlumpur, untuk merujuk pasien dari puskesmas Kecamatan Kotawaringin Lama menuju Rumah Sakit di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi sulit. Karena harus melalui Kabupaten Lamandau yang jaraknya relatif lebih jauh untuk menuju ke Kabupaten Kotawaringin Barat, dan sangat beresiko untuk keselamatan pasien yang dirujuk tersebut. Kemudian apabila musim kemarau tiba, jalan penghubung dari Kabupaten Kotawaringin Barat

menuju Kecamatan Kotawaringin Lama yang belum beraspal ini menjadi berdebu dan menimbulkan penyakit ispa. Namun untuk bidang perekonomian, untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari menjadi sangat sulit dan mahal karena apabila jalan tersebut banjir kemudian berlumpur, warga harus mengirim bahan pokok sehari-hari itu dengan menggunakan speedboat melalui jalur sungai yang mana dampaknya harga bahan pokok menjadi naik (Wawancara tanggal 20 September 2017 Pukul 16.15 WIB).

Mayarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kecamatan Kotawaringin Lama yang menggunakan jalan tersebut mengharap pihak yang memang mengurus pembangunan jalan ini dapat secepatnya di selesaikan agar masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut. Pembangunan Infrastruktur ini juga berhubungan dengan kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat yang menangani di bidang infrastruktur dan relasi antara Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Dimana peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sangat penting dalam pembangunan Infrastruktur untuk mensejahterakan warga yang menggunakan Infrastruktur ini dan penting bagi peningkatan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri. Dan apabila sudah tersambung maka banyak sekali efek positifnya terhadap masyarakat utamanya masyarakat Kecamatan Kotawaringin Lama (Kolam) akan lebih maju pesat. Rencana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menjadikan Kecamatan Kotawaringin

Lama sebagai Kecamatan tertua di Kabupaten Kotawaringin Barat akan terwujud dengan tujuan wisata religinya (Ujang Iskandar, 2014).

Menurut Sigit Dzakwan (2017), terhambatnya Pembangunan Infrastruktur ini adalah minimnya anggaran untuk perbaikan jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan ketika hujan turun, jalan ini sangat becek dan menghambat kerja proyek pembangunan tersebut. Jelas untuk masalah minimnya anggaran ini termasuk permasalahan kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat. Karena pada dasarnya dalam pembangunan infrastruktur jalan dari Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Kecamatan Kotawaringin Lama ini yang menjadi penanggung jawab proyek pembangunan adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tersebut.

Namun sebaliknya, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri belum mencapai tujuan organisasi tersebut yang bersangkutan dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri yang mana Infrastruktur tersebut tidak kunjung usai sampai saat ini. Bahkan H. Sugianto Sabran sebagai Gubernur Kalimantan Tengah menanggapi dengan serius, menekankan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mundur dari jabatannya jika tidak dapat menyelesaikan pembangunan jalan Trans Kotawaringin Barat-Kotawaringin Lama tersebut. Pihak Dinas Pekerjaan Umum sudah melakukan upaya untuk mempercepat

pembangunan tersebut dengan menaikkan status jalan ke Provinsi (Maman W, 2017).

Bahkan pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat juga berharap status jalan tersebut meningkat menjadi jalan Provinsi. Pengajuan peningkatan status jalan Kabupaten Kotawaringin Barat-Kecamatan Kotawaringin Lama ini bertujuan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ikut membantu perbaikan jalan. Sebab, jika status jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama beralih menjadi Jalan Provinsi, maka kewenangan perbaikan jalan tersebut juga berada di Pemerintah Provinsi Kalteng. Selain untuk menambah anggaran perbaikan jalan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat menilai peningkatan status jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama mendesak untuk dilakukan karena jalan tersebut juga menjadi jalan penghubung antara Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Kabupaten Sukamara (Hidayat, 2017).

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mencari permasalahan tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pembangunan Infrastruktur khususnya Infrastruktur jalan. Penelitian ini bertujuan selain untuk penilaian terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, juga bertujuan sebagai evaluasi terhadap organisasi publik lainnya untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, penulis ingin melaksanakan penelitian yang berjudul **“Kinerja Dinas Pekerjaan Umum**

Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Daerah Tahun 2016 ”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan dari Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Kecamatan Kotawaringin Lama Pada Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Pembangunan Jalan antar Kecamatan Di Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut.
2. Manfaat dari penulisan ini :
 - a. Secara teoritik bisa bermanfaat untuk menambah kajian pengetahuan tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Pembangunan Infrastruktur.
 - b. Secara praktis, dapat dijadikan acuan ataupun cara bagaimana kinerja suatu Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan sesuai dengan peraturan.

D. Tinjauan Pustaka

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu Tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam
Pembangunan Infrastruktur

Identitas Peneliti	Temuan	Rekomendasi
<p>Rozi, Bahru and Nugroho, Kandung Sapto and Jumiati, Ipah Ema (2016)</p> <p>tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Proyek Pembangunan Jalan Di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, Provinsi Banten</p>	<p>1. relitasnya ternyata dapat dikatakan belum berhasil, karena masih terdapat beberapa permasalahan seperti kurangnya akuntabilitas kinerja Dinas Bina Marga, kurang transparansinya terkait anggaran, dan lemahnya supremasi hukum.</p> <p>2. kurang berkualitasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga, anggaran yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan dinas, masih kurangnya tingkat kesadaran terhadap pelanggaran, dan lemahnya supremasi hukum.</p>	<p>Agar good governance bisa diterapkan dengan efektif dan efisien maka perlu meningkatkan pengawasan pada proses dan pelaksanaan pembangunan, membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik terkait dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas SDM pegawai yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak.</p>
<p>Faisal Nur, Sitti Bulkis dan Hamka Naping (2011)</p> <p>Tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa”</p>	<p>Tingkat pendidikan hanya berhubungan dengan partisipasi masyarakat pada tahap persiapan sedangkan homogenitas masyarakat tidak mempunyai hubungan terhadap partisipasi masyarakat.</p>	<p>Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap persiapan berupa kehadiran dan sumbangan ide atau pemikiran, pada tahap pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga, dana dan material, pada tahap pemeliharaan bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga.</p>

Identitas Peneliti	Temuan	Rekomendasi
<p>Juni Dwi Astono (2013)</p> <p>Tentang</p> <p>“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Melalui Disiplin Kerja Karyawan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah”</p>	<p>Dalam kegiatan sehari-harinya pemimpin sering menghadapi suatu masalah, hendaknya selalu bersikap arif dan bijaksana, ada saat-saat sulit Dalam pengambilan keputusan, pemimpin agar melibatkan bawahan (para pejabat eselon III), dari para bawahan akan mendapat masukan yang bisa dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.</p>	<p>Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Melalui Disiplin Kerja Karyawan Dinas sangat berpengaruh secara signifikan dan positif untuk kinerja Pimpinan dan Karyawan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah agar menjadi lebih efektif dan lebih baik.</p>
<p>Adianto Mesak (2013)</p> <p>Tentang “ Analisis Kinerja Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Dengan Pendekatan Balance Scorecard ”</p>	<p>Secara keseluruhan kinerja akhir pada Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Nunukan adalah sebesar 62,43%, atau masuk pada kategori skala cukup baik hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai kinerja akhir pada perspektif pelanggan yaitu sebesar 57,65 % atau masuk pada kategori cukup baik.</p>	<p>Dalam hal menata pelayanan administrasi agar tidak berbelit-belit, menjaga ketepatan waktu pelayanan dengan baik, meningkatkan tampilan fisik kantor untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Bidang Bina Marga harus memberikan pemahaman tentang visi, misi dan strategi organisasi kepada semua pegawai.</p>
<p>Yohanes F.C. Ransun, Freddie Kalangie, Yurnie Sendow (2017)</p> <p>Tentang “Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Daerah”</p>	<p>Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado masih tergolong asal – asalan dan tidak sepenuhnya berhasil. Itu dikarenakan masyarakat menilai hasil kerja yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat</p>	<p>Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado harus lebih baik dan serius, melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ada, agar masyarakat merasa puas dan dan terlayani dengan knera Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado.</p>

Identitas Peneliti	Temuan	Rekomendasi
<p>Azhari, Teuku Budi Aulia, Ibnu Abbas Majid (2014) tentang</p> <p>“ Faktor – Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Kinerja Kontraktor Pada Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Di Kabupaten Aceh Jaya “</p>	<p>Masalah pembebasan lahan; data desain tidak lengkap; gangguan keamanan; keterlambatan pengiriman material; terhambatnya keuangan pihak kontraktor; keterlambatan pembayaran oleh pemilik; kurangnya kedisiplinan tenaga kerja dan tenaga ahli; akses ke lokasi proyek; cuaca dan terakhir kurangnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja dan tenaga ahli.</p>	<p>Kontraktor seharusnya dapat mempersiapkan segala prosedur sebelum melaksanakan pembangunan infrastruktur agar tidak adanya kendala atau kekurangan dalam melaksanakan peroyek tersebut.</p>
<p>Watik Astunik (2015)</p> <p>Tentang</p> <p>“Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jalan</p>	<p>Dalam segi input masih ada kendala pada kekurangan dana, sarana dan prasarana dan pegawai.</p>	<p>Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan Dinas Pekerjaan umum kabupaten Tulang Bawang Barat harus responsif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat, lebih mengupayakan dalam penganggaran dana setiap tahunnya, dan dapat memenuhi segala kebutuhan sarana dan prasarana yang di inginkan.</p>

Identitas Peneliti	Temuan	Rekomendasi
<p>Nindra Sandria Ardana (2014) Tentang “Efektivitas Pasal 13 JO Pasal 14 Huruf (D) Peraturan Walikota Surabaya No. 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya Terkait Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Surabaya”</p>	<p>Masih kurangnya kesadaran dan kepedulian warga masyarakat terhadap kegiatan pembangunan jalan, yaitu warga yang tanahnya terkena pembebasan lahan untuk rencana pembangunan. Warga tersebut banyak yang tidak sepakat dengan adanya kegiatan pembangunan jalan ini dikarenakan ketidakcocokan harga ganti rugi tanah yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga pembangunan jalan menjadi lambat..</p>	<p>Pemerintah Kota Surabaya seharusnya dapat bersosialisasi kepada masyarakat akan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan, dan Pemerintah Surabaya harus bernegosiasi kepada masyarakat tentang ganti rugi kepada masyarakat agar antara masyarakat dan pemerintah tidak ada yang merasa dirugikan.</p>
<p>Imam Musaddad (2016) tentang “Produktivitas Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Pada Tahun 2015)”</p>	<p>Jika mendapat kategori buruk akan berdampak pada keberlangsungan rencana kerja dan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai DPU, dan berdasarkan hasil penelitian didalam DPU tidak terdapat masalah yang menghambat kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya.</p>	<p>Produktivitas ASN di DPU Bantul dinjau dari efektivitasnya Secara statistic bahwa nilai rata-rata unsur efektivitas memang berada pada interval 2,51s/d3,25 dan berkategori B dengan kata lain baik. Dan efisiensi juga cukup baik . Dan secara statistic bahwa nilai rata-rata efisiensi memang berada pada interval 2,51 s/d 3,25 dikategorikan B dengan kata lain baik. Sedangkan factor-faktor yang terdiri dari pengetahuan, keahlian, kemampuan, sikap, dan perilaku semuanya dikatan baik.</p>

Identitas Peneliti	Temuan	Rekomendasi
Christin Dessy Sahudege, Burhanudin Kiyai, Alden Laloma (2015), tentang “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat”	Masih ada pelayanan kepada masyarakat yang belum direspon, dan yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan perekonomian di Kabupaten Sorong khususnya adalah keterbatasan Anggaran, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.	Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan perekonomian di Kabupaten Sorong sudah berjalan dengan sangat baik, dan mengalami banyak peningkatan pada pembangunan infrastruktur jalan dan peningkatan perekonomian masyarakat dengan pembangunan pasar-pasar serbaguna dan pasar-pasar permanen sehingga mendapat kemajuan yang cukup baik dalam memprioritaskan perekonomian masyarakat lokal

Sumber :Hasil kajian peneliti dari berbagai jurnal

Melihat dari tabel di atas, review dari penelitian yang terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaannya yaitu dalam melaksanakan kinerjanya, Dinas Pekerjaan Umum sudah melakukan usaha dalam pembangunan infrastruktur jalan dengan semaksimal mungkin untuk mensejahterakan kebutuhan masyarakat dan untuk meningkatkan sektor ekonomi serta meningkatkan sektor sosial budaya suatu daerah. Namun, di balik persamaan tersebut, memiliki perbedaan pendapat antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini. Perbedaan itu adalah bahwa hal yang menghambat pembangunan infrastruktur ini beragam masalah yang setiap daerah memiliki permasalahan masing-masing. Adapun perbedaan masing-masing Dinas Pekerjaan umum dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan program yaitu berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur,

sumber daya manusia dalam Dinas Pekerjaan Umum, produktivitas kinerja, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Kinerja di artikan menurut Pasolong (2010:175) konsep kinerja terbagi menjadi dua bagian, kinerja perseorangan dan kinerja organisasi. Kinerja perseorangan adalah hasil kegiatan individu perseorangan tersebut dalam berorganisasi. Sedangkan kinerja organisasi merupakan hasil kegiatan yang dicapai oleh suatu organisasi. Antara kinerja perseorangan dan kinerja organisasi sangat berhubungan erat. Di karenakan berhasilnya pencapaian kinerja suatu organisasi tergantung oleh kinerja pegawai perseorangan tersebut dalam mencapai kinerjanya.

Sedangkan menurut Mahsun (2006:25) Kinerja merupakan suatu uraian untuk meningkatkan program atau kegiatan dalam pencapaian yang di lakukan oleh organisasi dalam memenuhi sasaran, visi, misi, yang telah tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja juga dapat di artikan sebagai hasil kerja dari suatu organisasi maupun kerja perseorangan yang mencapai keberhasilan. Keberhasilan kinerja suatu organisasi maupun kinerja perseorangan individu tidak akan berhasil apabila tidak memiliki target capaian atau tujuan yang jelas.

Byars (1984) berpendapat bahwa kinerja merupakan hasil dari usaha seseorang yang telah tercapai dengan kemampuan yang di miliki dalam situasi tertentu. Sedangkan menurut Robbins (2001) kinerja merupakan hasil yang di selesaikan oleh seorang pegawai dalam suatu pekerjaan tertentu. Hasil yang di maksud merupakan sejauh mana seorang pegawai dalam menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan yang telah di berikan sesuai dengan aturan dan tujuan dari kerja pegawai tersebut. Prawirosento dalam Sinambela (2012:5) juga berpendapat, kinerja merupakan nilai kerja yang dapat diraih oleh perseorangan atau kelompok orang dalam suatu organisasi, harus sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, untuk usaha dalam meraih tujuan dalam berorganisasi harus disetujui, dan tidak melanggar hukum. Tetapi menurut Bernard, John H dan Joyce E.A Russel (1993) Kinerja di artikan sebagai catatan dari hasil suatu kegiatan tertentu yang dapat menilai baik atau buruk kerja dari seseorang atau kelompok.

Pendapat lain juga keluar dari Bambang Guritno dan Waridin (2005), menurut mereka kinerja adalah membandingkan hasil kerja pegawai yang telah tercapai dengan kapasitas yang telah di tetapkan. Namun dalam pendapat Hakim (2006) menjelaskan kinerja merupakan pencapaian kerja yang telah di raih oleh perseorangan yang selaras dengan kegunaan atau kewajiban perseorangan tersebut dalam suatu organisasi atau kantor pada waktu yang telah di tentukan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil pencapaian kerja yang di dukung oleh sumber daya individu atau suatu organisasi

untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan cara membandingkan hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh seorang pegawai.

b. Kinerja Organisasi Publik

Mahsun (2006:1) berpendapat bahwa organisasi di artikan sebagai sekumpulan orang yang bekerja sama dalam memenuhi pencapaian tujuan atau sasaran yang telah disepakati bersama dengan cara yang terstruktur. Sedangkan menurut Sinambela (2012:182) organisasi sektor publik merupakan organisasi yang berkaitan dengan kepentingan umum dan menyediakan kebutuhan barang dan jasa masyarakat. Yang mana dalam menyediakan barang dan jasa ini akan dibayar melalui pajak, retribusi, dan pendapatan negara yang telah ada di atur dalam Undang-Undang. Organisasi sektor publik sangat berkaitan dengan pemerintah. Namun sesungguhnya sektor organisasi lebih luas dari pemerintah dalam memenuhi penyediaan barang dan jasa untuk publik.

Prawirosentono (1999) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kerja suatu organisasi akan mendukung kinerja organisasi tersebut dengan baik dan mudah di capai. Sedangkan menurut Perry (1989) Kinerja organisasi mengarah kepada kemampuan organisasi tersebut dalam mencapai suatu hasil yang baik dan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Hasil inilah yang akan menjadi patokan kinerja dari suatu organisasi tersebut. Penilaian ini yang menentukan baik dan buruknya suatu organisasi dalam menyelesaikan tugas yang telah di amanatkan kepada pihak organisasi tersebut.

Atmosudirdjo dalam Pasolong (2010:176) memiliki pendapat bahwa kinerja organisasi merupakan sebagai kemampuan suatu organisasi secara rata dalam memenuhi keperluan yang telah di absahkan dari organisasi yang mengenai dalam meningkatkan efektivitas organisasi secara berlanjut untuk tercapainya kebutuhan secara kompeten. Sedangkan menurut Hodge, Anthony dan Gales (1996) berpendapat bahwa kinerja organisasi merupakan suatu kegiatan organisasi yang memiliki tujuan atau keuntungan dalam mencapai tingkat kepuasan pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan dari organisasi tersebut. Namun Pasolong (2010:175) menjelaskan bahwa kinerja organisasi adalah keseluruhan hasil dari kerja atau kegiatan yang dapat tercapai oleh suatu organisasi tersebut. Ada beberapa elemen yang di miliki oleh kinerja organisasi yaitu :

- a. Hasil aktifitas yang diraih secara perseorangan atau secara lembaga, yang merupakan kinerja yang di lakukan adalah total akhir yang di dapat secara perseorangan atau perkelompok.
- b. Dalam menjalankan tugas,individu atau institusi diberikan wewenang dan tanggung jawab, yang merupakan individu atau institusi ini di beri hak dan kekuasaan untuk mengerjakan tugas dengan harapan pekerjaan tersebut dapat selesai secara baik.
- c. tugas yang di kerjakan oleh suatu organisasi harus sesuai peraturan yang telah di tetapkan.

- d. Pekerjaan yang di kerjakan suatu organisasi tidak bertolak belakang dengan moral dan etika, artinya pihak organisasi tidak melanggar aturan maupun moral dan etika yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bawa kinerja organisasi publik merupakan hasil kerja suatu organisasi publik dalam mencapai target atau sasaran untuk melayani atau menyediakan barang dan jasa kepada publik dalam memenuhi kebutuhan dan melakukan segala kegiatan mengenai tugas dan fungsi, organisasi harus bekerja sesuai dengan aturan maupun moral dan etika.

- c. Pengukuran Kinerja

Robertson dalam Mahsun (2006:25) berpendapat bahwa pengukuran kinerja adalah suatu cara penilaian kemajuan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan tujuan dan target yang sebelumnya sudah di tetapkan, termasuk penjelasan atas ketetapan dalam menggunakan sumber daya yang menciptakan barang dan jasa, yang mana barang dan jasa ini berkualitas baik dan dapat membuat pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang di berikan, dan hasil aktifitas ini disatukan dengan tujuan yang diharapkan dan kemampuan dalam mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Mahsun (2006:53) pengukuran kinerja merupakan suatu cara yang dipakai untuk mengetahui dan menilai kegiatan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan tujuan, sasaran, serta strategi untuk mengetahui tingkatan kemampuan serta tanggung jawab dari organisasi tersebut

dalam mengambil suatu kebijakan. Elemen pokok dalam suatu pengukuran kinerja yaitu :

- a. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi.
- b. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.
- c. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi.
- d. Evaluasi Kinerja

Menurut (Cahyono, 2000) pengukuran kinerja adalah salah satu unsur yang penting dalam suatu organisasi. Pengukuran kinerja tersebut dapat digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya kegiatan organisasi dan dapat digunakan untuk dasar menyusun formasi organisasi. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, “pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan antara kerja yang seharusnya terjadi dengan kerja yang diharapkan.

Intanghina (2008:6) berpendapat bahwa pengukuran kerja merupakan suatu cara untuk meningkatkan dalam hal mengambil suatu keputusan maupun kemampuan. Dan kinerja juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu sasaran maupun tujuan. Whittaker dan Simons (2000) dalam intanghina (2008:7) menjelaskan pengukuran kinerja adalah cara untuk menilai dan membandingkan kemajuan suatu kinerja yang telah tercapai sesuai dengan tujuan yang telah di

tetapkan. Namun pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai alat untuk menentukan siapa yang mendapat penghargaan atau hukuman, tetapi pengukuran kinerja di gunakan sebagai alat komunikasi dan manajemen dalam membentuk sebuah kinerja organisasi atau pegawai menjadi lebih baik lagi.

Pasolong (2010:182) juga berpendapat bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kerja, program, dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan yang baik. Pengukuran kinerja merangkap dalam penetapan untuk mencapai indikator suatu kinerja. Adapun tujuan dari pengukuran kinerja yang dijelaskan oleh Mardiasmo dalam Pasolong (2010:185) yaitu :

- a. Membantu dalam urusan kegiatan pemerintahan agar fokus terhadap tujuan dan sasaran program bagian kerja.
- b. Menentukan sumber daya dan menentukan dalam pembuatan suatu keputusan
- c. Merealisasikan keinginan publik dan menjaga dengan baik komunikasi antar lembaga.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai dan mengukur kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kerja suatu organisasi maupun pegawai dalam melaksanakan tugas agar lebih baik lagi dan sesuai dengan tujuan serta sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Dan tujuan dari pengukuran kinerja

sendiri untuk menetapkan keputusan yang akan berdampak pada kemajuan kinerja yang lebih baik untuk kedepannya.

d. Indikator Kinerja

Menurut Sudarmayanti (2007:198), indikator kerja merupakan ukuran untuk menggambarkan sejauh mana tingkat dalam mencapai sasaran dan tujuan sesuai yang ditetapkan. Indikator kerja digunakan untuk melihat kegiatan kerja organisasi setiap harinya dalam melaksanakan tugas sesuai sasaran dan tujuan yang dilaksanakan dengan menunjukkan kemampuan suatu organisasi tersebut. Sedangkan menurut Wibowo (2010:128) indikator kinerja digunakan sebagai kegiatan untuk mengukur perilaku yang diamati secara kualitatif.

Menurut Pasolong (2010:178), adapun hal-hal dalam menentukan indikator kinerja yaitu : (1) detail dan jelas, (2) terukur secara deskriptif maupun secara perhitungan, (3) dapat memperlihatkan hasil pencapaian, manfaat dan akibat, (4) dapat mudah dalam menyesuaikan dan peka terhadap perubahan, dan (5) mengolah data dan menganalisis secara tepat dan kompeten. Sedangkan menurut Nasucha dalam Pasolong (2010:180), ada lima indikator kerja dalam bagian masyarakat, antara lain :

- a. Menunjukkan seberapa besar suatu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- b. Biaya yang digunakan lebih ekonomis.

- c. Memperllihatkan ketetapan dalam membandingkan hasil dengan output.
- d. Memiliki kemampuan untuk menunjukkan dalam membandingkan hasil yang telah dikeluarkan dan yang ingin dicapai.
- e. Adanya bukti dalam meningkatkan keadilan dari kebijakan yang telah dikeluarkan.

Namun menurut Bastian (2010:33) indikator kinerja merupakan ukuran yang melalui jumlah dan deskripsi lalu memberikan pemahaman dalam mningkatkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Adapun indikator tersebut ialah :

- a. Indikator masukan, merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh organisasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti barang dan jasa, sumber daya manusia, informasi, kebijakan dan lainnya.
- b. Indikator keluaran, merupakan suatu harapan yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan.
- c. Indikator hasil, merupakan efek langsung dari fungsi kegiatan pada jangka menengah.
- d. Indikator manfaat, merupakan hasil dari segala tujuan pelaksanaan suatu kegiatan.
- e. Indikator pengaruh, merupakan pengaruh yang terjadi pada setiap indikator yang telah ditetapkan.

Lain halnya menurut Dwiyanto (2006:50-51) ada beberapa faktor indikator kinerja yang dapat mengukur kinerja dari sebuah organisasi, yaitu :

- a. Produktivitas, konsep produktivitas di ukur untuk menentukan tingkat ke efisiensi dan ke efektivitasan dalam melakukan pelayanan. Produktivitas juga digunakan untuk mengukur rasio antara pengeluaran dan pemasukan secara umumnya yang diharapkan menjadi indikator kinerja yang penting.
- b. Kualitas layanan, merupakan suatu indikator kerja dalam kepuasan masyarakat terhadap kinerja organisasi yang sering kali mendapat sorotan dari masyarakat. Informasi terhadap kepuasan masyarakat ini terkadang didapatkan melalui media massa maupun diskusi masyarakat. Karena kepuasan masyarakat berperan penting sebagai mengukur kinerja dari organisasi tersebut.
- c. Responsivitas, merupakan kemampuan organisasi untuk mengetahui apasaja yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Responsivitas dapat menjadi indikator kerja karena dapat menjelaskan tujuan dari organisasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- d. Responibilitas, merupakan alat untuk mendeskripsikan dalam pelaksanaan suatu kegiatan organisasi publik yang sesuai dengan ketentuan organisasi dalam mensejahterakan pelayanan kepada masyarakat.

- e. Akuntabilitas, merupakan konsep untuk menggambarkan kegiatan dan keputusan suatu organisasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, indikator kinerja merupakan suatu alat untuk mengukur sejauh mana kinerja organisasi publik dalam pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator ini juga berperan sebagai penilaian dari masyarakat terhadap kinerja suatu organisasi apakah sudah baik ataupun belum dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang telah ditetapkan oleh keputusan suatu organisasi yang sesuai dengan sasaran maupun tujuan.

2. Pembangunan

Menurut Siagian (1998) pembangunan merupakan kegiatan dalam usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dikerjakan secara sadar untuk suatu bangsa, negara, dan pemerintah kearah modern dalam rangka membina bangsa. Sedangkan menurut Ginanjar Kartasmita (1994) bahwa pembangunan merupakan rangkaian perubahan menuju kearah yang lebih baik yang dikerjakan secara terencana. Namun menurut Tikson (2005) pembangunan merupakan perubahan dalam ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan secara sadar melalui keputusan dan formasi yang diharapkan.

Dalam buku yang ditulis oleh Inu Kencana (2006:96) yang berjudul Ilmu Administrasi Publik mendefinisikan bahwa pembangunan merupakan sebuah perbaikan yang dari suatu situasi nasional ke situasi nasional yang lain dalam rangka menuju ke perubahan yang jauh lebih baik lagi. Sedangkan Sunyoto Usman (2004:5) berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kapasitas dari sektor Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam dalam tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat yang sering kali hanya dijadikan sebagai alasan untuk mengejar sebuah kesuksesan oleh public maupun suatu kelompok tertentu.

Pembangunan juga di artikan oleh Tjokromidjojo, Bintoro, dan Mustopadidaja (1980:58) merupakan suatu usaha untuk melakukan perubahan dari kondisi tertentu menjadi suatu kondisi yang jauh lebih baik dan yang diinginkan. Namun Adrian Leftwich (2000:17) mengemukakan jika pembangunan dikategorikan menjadi sembilan pendekatan pokok, yaitu pembangunan yang dilihat untuk kemajuan yang akan datang, pembangunan untuk pendayagunaan sumber daya alam, merencanakan pembangunan untuk memperkenalkan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, pembangunan untuk melihat keadaan tertentu, pembangunan untuk proses yang lebih baik lagi, pembangunan untuk meningkatkan skala dibidang ekonomi, pembangunan digunakan untuk perubahan yang tersusun, pembangunan sebagai arah dalam menuju modern, dan pembangunan sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan dalam produksi.

Namun dibalik pembangunan yang mengharapkan perubahan yang lebih baik dan yang sesuai tidak semata-mata langsung tercapai. Pasti ada saja halangan yang akan menghambat pembangunan tersebut terealisasikan. Sadono Sukimo (1976) menjabarkan hal-hal yang dapat menghambat suatu pembangunan itu, yakni :

- a. Pembangunan Nasional mampu dalam meningkatkan ekonomi suatu negara dan berbagai daerah, sehingga pembangunan didaerah tidak dikerjakan karena pembangunan didaerah tersebut sudah difasilitasi oleh pembangunan Nasional.
- b. Strategi dan rencana pembangunan daerah tidak ada bedanya dengan strategi dan rencana pembangunan nasional, jadi tidak perlu lagi ada teori dan analisa tentang permasalahan untuk pembangunan didaerah.
- c. Kurangnya tenaga ahli dalam merealisasikan pembangunan tersebut.

Tetapi pembangunan juga di jelaskan oleh Ridhiansyah Adi Permana (2010), bahwa pembangunan merupakan upaya untuk mencapai kualitas sarana dan prasarana serta infrastruktur yang dilaksanakan secara berkelanjutan, sesuai dengan efektivitas suatu daerah, dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, serta melihat tantangan dalam perkembangan daerah, nasional, dan global.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dari kondisi tertentu menjadi kondisi yang lebih baik untuk lagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari

sektor ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam, sumber daya manusia menuju perubahan yang di inginkan secara berkelanjutan dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat.

3. Infrastruktur

a. Pengertian Infrastruktur

Pengertian infratruktur menurut Grigg (1988) adalah proses fisik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sosial maupun ekonomi, seperti meyediakan transportasi, jalan, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan oleh mayarakat. Infrastruktur sebagai proses juga merupakan bagian seperti sarana prasarana yang saling berhubungan. Infrastruktur juga sangat berperan penting dalam proses sosial maupun ekonomi dikalangan masyarakat. Maka dari itu, infrastruktur dijadikan sebagai dasar dalam menentukan keputusan.

Namun menurut American Public works Association (Stone, 1974:12), infrasrtuktur dijleaskan sebagai fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh pelaku dalam pembangunan infrastruktur yang digunakan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan air, transportasi, pembuangan limbah, tenaga listrik, dalan pelayanan umum dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Sedangkan menurut Moteff (2003), infrastruktur tidak hanya mengurus dalam hal ekonomi maupun sosisal, tetapi infrastruktur juga mengurus terhadap masalah pertahanan dan keberlanjutan

dalam pemerintah. Disini menjelaskan bahwa infrastruktur ini tidak hanya fokus terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti masalah sosial dan ekonomi. Tetapi dalam sudut pandang yang lain, infrastruktur juga fokus terhadap masalah pertahanan dan keberlanjutan dalam suatu pemerintahan.

Selanjutnya Vaughn and Polland (2003) juga berpendapat bahwa infrastruktur secara umum memiliki beberapa cakupan dalam pelayanan umum, meliputi jalan, jembatan, pelabuhan, bangunan umum, dan lain lain yang bersangkutan dengan kebutuhan masyarakat. J'afar M. (2007) mengemukakan infrastruktur memiliki fungsi positif terhadap perkembangan serta pertumbuhan ekonomi jangka pendek dalam menciptakan lapangan kerja konstruksi yang akan mendukung perusahaan disektor terkait.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur mendefinisikan infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Namun menurut Soerjo (2007), infrastruktur dipahami sebagai material fisik, seperti jalan, jaringan drainase, instalasi listrik dan jaringan air minum yang berhubungan dengan permasalahan infrastruktur sipil dan perkotaan. Tetapi infrastruktur juga berperan terhadap pembangunan dan prosuder operasi. Konteks ini dikenal sebagai istilah Hard Infrastruktur dan Soft Infrastruktur yang

mana kedua jenis ini saling berkaitan dalam menciptakan pelayanan infrastruktur secara penuh dan memiliki cakupan yang luas.

Infrastruktur juga terbagi menjadi tiga menurut The World Bank (1994), yaitu :

- a. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur nyata yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, seperti tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas, jalan, bendungan, kanal, irigasi, drainase, rel, pelabuhan, lapangan terbang, dan lain-lain.
- b. Infrastruktur sosial, infrastruktur untuk menunjang kegiatan pendidikan, kesehatan, perumahan, tempat rekreasi.
- c. Infrastruktur administrasi, infrastruktur dalam menunjang kegiatan penegakan hukum, kontrol administrasi, dan koordinasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan Infrastruktur merupakan kegiatan fisik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sosial maupun ekonomi, seperti menyediakan transportasi, jalan, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Infrastruktur ini tidak hanya fokus terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti masalah sosial dan ekonomi saja. Tetapi dalam sudut pandang yang lain, infrastruktur juga fokus terhadap masalah pertahanan dan keberlanjutan dalam suatu pemerintahan.

b. Jenis Infrastruktur

Menurut Kodoatie (2005), infrastruktur sebagai pendorong utama meningkatkan proses sosial dan proses ekonomi yang dilakukan dalam halkeselarasannya secara menyeluruh. Infrastruktur yang merupakan kebutuhan untuk mengembangkan kegunaan pemerintah dalam hal pelayanan harus bekerja secara sama-sama dan tidak dapat terpisah. Grigg (1988) menjelaskan infrastruktur memiliki 13 kategori, ialah :

- a. Sistem penyediaan air, seperti waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, dan fasilitas pengolahan air.
- b. Untuk mengelola air limbah, seperti mengumpulkan, mengolah, pembuangan, dan daur ulang air limbah.
- c. Alat untuk mengolah limbah padat.
- d. Alat untuk menanggulangi banjir, drainase, dan saluran irigasi.
- e. Alat mengalirkan air dan arah air.
- f. Pemenuhan kebutuhan transportasi, seperti rel, jalan, lapangan terbang, dan lain-lain yang berhubungan dengan transportasi.
- g. Sistem transit public.
- h. Untuk pemenuhan kebutuhan listrik, seperti produksi dan distribusi.
- i. Fasilitas dalam mengelola gas alam.
- j. Pemenuhan fasilitas public, seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan.
- k. Pengadaan perumahan.

- l. Pengadaan rekreasi public, seperti taman kota, plaza, dan lain-lain.
- m. Pengadaan kebutuhan komunikasi.

Kemudian ada tujuh bagian besar infrastruktur menurut Grigg (1988), yaitu :

- a. Bagian jalan, seperti jalan, jalan raya, jembatan.
- b. Bagian pelayanan dalam transportasi, seperti jalan, rel, pelabuhan kapal, lapangan terbang.
- c. Bagian komunikasi.
- d. Bagian pengelolaan air, seperti air bersih, air kotor.
- e. Bagian mengatur limbah.
- f. Bagian dalam pembangunan dan olahraga luar,
- g. Bagian produksi dan distribusi energi, seperti listrik dan gas.

Namun menurut Kenastri (2007), infrastruktur Pekerjaan Umum di Indonesia dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu :

1. Infrastruktur Jalan
2. Infrastruktur Pengairan
3. Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

Berdasarkan penjelasan di atas tentang infrastruktur yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah termasuk ke dalam infrastruktur transportasi yaitu jalan.

F. Definisi Konsepsional

Definisi konseptual merupakan suatu abstraksi dari kerangka dasar teori oleh para ahli yang didefinisikan kembali dengan pendapat sendiri. Adapun definisi konseptual dalam permasalahan ini adalah:

1. Kinerja

Kinerja adalah hasil pencapaian kerja yang di dukung oleh sumber daya individu atau suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran kerja yang telah di tetapkan dengan menggunakan cara membandingkan hasil kerja yang telah di laksanakan oleh seorang pegawai.

2. Pembangunan

Pembangunan adalah usaha yang di lakukan secara sadar dari kondisi tertentu menjadi kondisi yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju perubahan yang di inginkan secara berkelanjutan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan kegiatan fisik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sosial, ekonomi, pertahanan dan keberlanjutan dalam suatu pemerintahan.

G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini, peneliti fokus untuk mengukur dari indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, yang

menurut Dwiyanto (2006:50-51) ada lima indikator kinerja untuk menentukan kinerja menjadi lebih baik, yaitu :

1. Kinerja

a. Produktivitas

- 1) Cara mencapai hasil yang telah ditetapkan.
- 2) Perbandingan antara rencana dan hasil pembangunan.

b. Kualitas Layanan

- 1) Pola perilaku pegawai dalam menanggapi dan memberikan pelayanan yang dikehendaki oleh masyarakat.
- 2) Pelayanan yang tepat dan sesuai.

c. Responsivitas

- 1) Respon yang cepat dalam menanggapi kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- 2) Memiliki daya kemampuan untuk memberikan solusi.

d. Responbilitas

- 1) Kegiatan serta program yang dilakukan sesuai dengan visi dan misi.
- 2) Sesuai dengan prosedur kegiatan.

e. Akuntabilitas

- 1) Tanggung jawab untuk mengevaluasi kegiatan.
- 2) Transparansi dalam melaksanakan kegiatan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam karya tulis ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Disini peneliti ingin mencoba untuk menjelaskan, menggambarkan, dan memberikan pandangan secara jelas tentang permasalahan yang ingin diteliti, yaitu Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Pembangunan Infasrtuktur Derah Tahun 2016.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber atau informan bersangkutan terlibat dalam proses melaksanakan program tersebut yang memiliki data secara jelas dan lengkap. Data primer dapat berupa opini subjek atau kelompok dan hasil dari kegiatan observasi lapangan terhadap suatu kejadian atau kegiatan. Data primer ini diperoleh berdasarkan data dari wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis secara tidak langsung. Semisalnya dari dokumen, arsip, atau literatur terdahulu yang di publikasikan atau tidak di publikasikan yang berkaitan dengan

identifikasi masalah yang akan diteliti. Data sekunder yang di kumpulkan peneliti dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen.

3. Lokasi Penelitian / Unit Analisa

Lokasi penelitian ini akan fokus pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama dan jalan dari Kabupaten Kotawaringin Barat menuju ke Kecamatan Kotawaringin Lama.

4. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memenuhi serta melengkapi data yang dibutuhkan oleh penulis dalam menjelaskan dan menggambarkan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun teknik yang akan digunakan penulis, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab mendalam secara tatap muka yang akan dilakukan penulis terhadap informan atau narasumber untuk menanyakan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam memenuhi data yang dibutuhkan peneliti, maka sasaran dalam wawancara ini adalah Kepala Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Dinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Kecamatan Kotawaringin Lama dan informan yang memiliki informasi data lengkap yang dibutuhkan oleh penulis. Wawancara ini dilakukan sampai peneliti mendapatkan seluruh data yang dicari, apabila data sudah terpenuhi, maka wawancara akan diakhiri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Dokumentasi yang diperlukan berupa, dokumen-dokumen, surat-menyurat, Peraturan Daerah, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga akan mencari data lewat dokumen-dokumen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Adapun dokumen-dokumen yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat, Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dan Lakip Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

c. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti dalam mencari data dengan mengamati keadaan yang sebenarnya terjadi

terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengamati keadaan jalan yang belum selesai tersebut, dan ingin mengamati kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menangani pembangunan infrastruktur jalan yang ingin diteliti oleh peneliti.

5. Teknis Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Kegiatan yang dilakukan menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2001:246-249), yaitu :

a. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan proses untuk memilih hal-hal yang dianggap pokok, untuk mempermudah penulis melakukan penjelasan dan gambaran yang didapat di lapangan serta dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya. Tidak hanya itu, reduksi juga dapat membantu penulis dalam memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga dapat membantu menjawab pertanyaan peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan agar mudah memahami apa yang terjadi selama di lapangan, dan dapat merencanakan kembali

rencana kerja selanjutnya dengan berdasarkan yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Proses pengumpulan data, mencari masalah-masalah yang terjadi saat dilapangan, menyusun data-data yang telah didapat selama dilapangan, kemudian apabila dirasa data dilapangan sudah lengkap, penulis akan menyimpulkan hasil data selama penelitian dilapangan, menjadi kesimpulan yang valid.

6. Rencana Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan ini, peneliti akan mencoba menjelaskan pembahasan ini secara jelas dan tersusun. Dimana pembahasanan ini akan di bagi menjadi 4 bab, dan masing-masing bab, yaitu :

BAB I: PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka dasar teori, definisi konseptual, definisi Operasional, metode penelitian, dan rencana sistematika penulisan.

BAB II: DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Menjelaskan secara ringkas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.

**BAB III: PEMBAHASAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAERAH TAHUN
2016**

Menjabarkan hasil yang telah didapat dari keseluruhan rangkaian penelitian tentang kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pembangunan infrastruktur daerah tahun 2016, dan kemudian hasil dari penelitian tersebut dijelaskan secara terperinci

BAB IV : PENUTUP

Menjabarkan hasil penelitian yang telah didapat dengan pandangan penulis, serta memberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan terletak di daerah khatulistiwa diantara 1°19' sampai dengan 3° 36' Lintang Selatan, 110° 25' sampai dengan 112° 50' Bujur Timur. Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri terletak di antara 3 Kabupaten, yaitu bagian sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan, bagian sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara, dan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri memiliki wilayah seluas 10.759 km². Kemudian dengan adanya perpecahan wilayah, kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, terdapat 3 Kabupaten hasil pecahan wilayah, yaitu Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kabupaten Kotawaringin Barat sejak tahun 2003 semakin berkembang, dengan terjadi adanya pemekaran kecamatan, dari yang awalnya hanya 4 kecamatan, kini menjadi 6 kecamatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah No.10 Tahun 2003. Adapun kecamatan yang mengalami pemekaran ialah kecamatan Kumai, kecamatan Pangkalan Lada dan kecamatan Pangkalan Banteng. Kecamatan Kumai merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah sebesar 2.921 km² (28,13 % dari total luas kabupaten), dan kecamatan Pangkalan Lada merupakan kecamatan yang paling kecil dengan luas wilayah 229 km² (3,08 %

dari total luas kabupaten). Secara keseluruhan Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 6 Kecamatan yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Daftar Kecamatan dan Ibukota Kecamatan Serta Jumlah Desa Atau Kelurahan

No	Kecamatan	Ibukota kecamatan	Desa / Kelurahan
1	Kotawaringin Lama	Kotawaringin	15 Desa/2 Kelurahan
2	Arut Selatan	Pangkalan Bun	13 Desa/7 Kelurahan
3	Kumai	Kumai	15 Desa/3 Kelurahan
4	Pangkalan Banteng	Karang Mulya	17 Desa/-
5	Pangkalan Lada	Pandu Sanjaya	11 Desa/-
6	Arut Utara	Pangkut	10 Desa/1 Kelurahan

Sumber :Di akses melalui <https://kobarkab.bps.go.id/> pada tanggal 2 Mei Tahun 2018 Pukul 18.40.

Secara fisiografi, Kabupaten Kotawaringin Barat digolongkan menjadi empat bagian, yaitu bagian daratan, berombak (daerah utara), berombak dengan daerah berbukit dan daerah berbukit. Dari enam kecamatan di atas, luas masing-masing kecamatan dapat dijelaskan penulis sebagai berikut :

Luas wilayah enam kecamatan yang ada di Kotawaringin Barat berdasarkan presentase :

- a. Kecamatan Kotawaringin Lama memiliki Luas Wilayah 12% dari luas wilayah Kotawaringin Barat.
- b. Kecamatan Arut Selatan memiliki luas wilayah 22 % dari luas wilayah Kotawaringin Barat.
- c. Kecamatan Kumai memiliki luas wilayah 27 % dari luas wilayah Kotawaringin Barat.
- d. Kecamatan Pangkalan Banteng memiliki luas wilayah 12 % dari luas wilayah Kotawaringin Barat.
- e. Kecamatan Pangkalan Lada memiliki luas wilayah 2 % dari luas wilayah Kotawaringin Barat.
- f. Dan Kecamatan Arut Utara memiliki luas wilayah 25 % dari luas wilayah Kotawaringin Barat.

sumber :Di akses melalui <https://kobarkab.bps.go.id/> pada tanggal 2 Mei Tahun 2018 Pukul 18.40.

Berdasarkan persentase diatas kecamatan yang paling luas wilayahnya di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kecamatan Kumai dengan luas wilayah 27 %.

Dalam aspek demografis secara menyeluruh jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2010 sebanyak 235.803 jiwa, terdiri dari 121.650 orang laki-laki dan 109.334 orang perempuan. Penduduk pada umumnya tersebar dipusat kota, baik kabupaten ataupun kota, dan kawasan permukiman di Kotawaringin Barat yang cukup padat (di akses melalui <https://kobarkab.bps.go.id/> pada tanggal 2 Mei Tahun 2018 Pukul 18.40).

Bidang pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia. Gambaran umum kondisi pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain terlihat dari jumlah prasarana sekolah. Dilihat dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK pada tahun pelajaran 2014/2015 berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 109.889 orang. Kemudian mengalami penurunan jumlah murid pada tingkat SD sebesar 2,07%, sedangkan pada tingkat SMP mengalami penurunan 0,56%, dan pada tingkat pendidikan SMA/SMK naik sebesar 3,05% dari pada tahun ajaran sebelumnya. Penyediaan sarana fisik dan tenaga guru yang memadai sangat diperlukan dalam menunjang pendidikan. Tahun 2014/2015 jumlah guru SD turun sebesar 5,00%, SMP turun sebesar 2,86%, dan guru SMA/SMK turun sebesar 3,90% (Santoso, 2017).

Dalam segi kesehatan merupakan aspek yang sangat berperan penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Hal tersebut harus didukung dengan adanya fasilitas sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Untuk memenuhi adanya fasilitas kesehatan yang memadai tentunya harus ada kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam bidang kesehatan. Sampai pada tahun 2014 terakhir sudah ada 3 unit rumah sakit di Kotawaringin Barat, 1 rumah sakit pemerintah dan 2 rumah sakit dari pihak swasta. Serta adanya pembangunan sarana dan prasarana untuk masyarakat seperti tersedianya pusat kesehatan

masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 16 Puskesmas. (sumber : Kotawaringin Barat dalam Angka 2016).

Dalam sektor ekonomi, pertanian, dan perikanan merupakan sektor yang mempengaruhi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Karena hampir separuh warga Kotawaringin Barat menggunakan sektor-sektor ini sebagai mata pencaharian mereka. Kabupaten Kotawaringin Barat juga merupakan wilayah industri utama di Kalimantan Tengah, seperti Industri Minyak Kelapa Sawit, Industri olahan kayu, Industri minyak bumi. Dari sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut merupakan salah satu pemasukan Sumber Daya Alam yang dapat meningkatkan perekonomian Daerah terkhusus Perekonomian masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam sektor transportasi merupakan aspek yang sangat berpengaruh dalam melakukan segala kegiatan masyarakat. Kegiatan sektor ekonomi, sektor politik, budaya, sektor barang dan jasa, bahkan dalam kegiatan daya tarik melakukan investasi. Jaringan jalan yang adalah satu faktor penunjang dalam memudahkan segala kegiatan tersebut. Berkembangnya segala kegiatan usaha akan memberikan keuntungan bagi perekonomian daerah secara umumnya. Apalagi pergerakan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan kegiatan ekonomi hampir seluruhnya menggunakan jalan darat. Hal ini terjadi karena Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan gerbang datangnya kapal-kapal yang membawa barang dari luar pulau Kalimantan. Dalam kurun waktu 2007-2011 masih banyaknya keadaan jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat masih

mengalami kerusakan yang membuat segala kegiatan melalui jalan darat sedikit terhambat.

Tabel 2.2
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2015-2018

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)			
		2015	2016	2017	2018
1	Kondisi Baik	545,09	555,04	564,22	431,46
2	Kondisi Sedang Rusak	415,25	420,28	421,65	349,62
3	Kondisi Rusak	164,35	160,85	162,05	119,82
4	Kondisi Rusak Berat	98,15	86,67	74,92	321,94
5	Jalan Secara Keseluruhan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota)	1222,85	1222,85	1222,85	1222,85

Sumber : RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018

Berdasarkan data di atas, dari tahun 2015 sampai 2018 kondisi jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami kondisi sedang rusak. Dan pada tahun 2016, kondisi jalan yang sedang rusak sekitar 420,28 km, kemudian pada tahun 2017 sampai 2018, kondisi jalan yang sedang rusak mengalami perbaikan dan akhirnya pada tahun 2018 kondisi jalan yang sedang rusak di kabupaten Kotawaringin Barat sekitar 349,62 km. Melihat kondisi jalan di Kotawaringin Barat yang masih rusak tentunya masih dibutuhkan usaha dari pemerintah untuk menjadikan jalan tersebut menjadi lebih baik agar upaya dalam memaksimalkan kegiatan ekonomi di Kotawaringin Barat lebih meningkat.

B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan tugas adalah :

- a. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai unsur teknis yang berkedudukan di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas Pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Susunan Organisasi

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

a. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;

b. Kepala Sub Bagian Keuangan;

c. Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Perencanaan Program.

3. Bidang Terdiri Dari :

a. Kepala Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

1. Kepala Seksi Irigasi dan Rawa;

2. Kepala Seksi Bina Penatagunaan dan Pengembangan Jaringan SDA;

3. Kepala Seksi Sungai dan Pantai.

b. Kepala Bidang Bina Marga, terdiri dari :

1. Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;

2. Kepala Seksi Jalan;

3. Kepala Seksi Jembatan.

c. Kepala Bidang Cipta Karya, terdiri dari :

1. Kepala Seksi Perencanaan Cipta Karya;
2. Kepala Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman;
3. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum

d. Kepala Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang;
2. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang;
3. Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang.

e. Kepala Bidang Bina Konstruksi, terdiri dari :

1. Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi;
2. Kepala Seksi Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi;
3. Kepala Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :

1. Kepala UPTD Alat Berat;
2. Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pembinaan dan penyusunan program dan kegiatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas ;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebagaimana visi nya adalah Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, maka Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “Gerakan membangun Kabupaten Kotawaringin Barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan ikhlas. Dan agar visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dapat berjalan dengan baik, maka ada strategi atau misi yang akan dilakukan, adapun misi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu :

- a. Memperkuat tata Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan;
- b. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga;
- c. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup;
- d. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
- e. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan dinamis;
- f. Melestariakan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata.

Relevansi tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap visi dan misi tersebut di atas adalah pada misi ketiga yaitu “Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup. Selama lima tahun terakhir, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat telah berusaha untuk mengejar ketinggalan dan kesenjangan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Percepatan pembangunan infrastruktur ke depan akan diarahkan sebagai berikut :

- a. Percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan yaitu desa menuju kota dan meningkatkan kualitas jalan antar desa dan desa ke kecamatan;

- b. Peningkatan kualitas jalan-jalan strategis dan penghubung untuk lintas ekonomi guna pemenuhan sembilan pokok dan secara khusus jalan pertanian untuk memudahkan perdagangan hasil bumi dan pertanian;
- c. Pembangunan jalan lingkaran luar kabupaten;
- d. Penuntasan pembangunan jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama;
- e. Pembukaan jalan Kecamatan Arut Utara ke Kabupaten;
- f. Pembangunan jembatan penghubung antar desa dengan Kecamatan yang melalui sungai;
- g. Pemetaan jalan umum dan lingkungan serta peningkatan kelas jalan;
- h. Pembangunan Water Front City;
- i. Penyempurnaan sistem dan mekanisme penanganan proyek untuk efisiensi dan menekan kebocoran anggaran;
- j. Pelaksanaan pembangunan prioritas, merata, seimbang, dan tepat guna;
- k. Rehabilitasi infrastruktur yang rusak dan yang tidak sesuai peruntukannya;
- l. Perawatan infrastruktur secara berkala dan cepat tepat penanganannya;
- m. Pengadaan sarana dan prasarana yang lebih modern dan canggih;
- n. Melanjutkan dan meningkatkan saluran irigasi serta normalisasi saluran;
- o. Penyediaan konservasi air dan penyediaan air baku;
- p. Pengelolaan dan pengendalian sumber air yang komprehensif untukantisipasi banjir dan kekeringan.

Sumber : Lakip Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

Setelah itu ada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat juga memiliki Sasaran spesifik yang ingin dicapai dari visi dan misi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di daerah perkotaan dan perdesaan;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air yang mencukupi serta terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian dan konsumsi masyarakat;
- c. Berkurangnya laju kerusakan lingkungan;
- d. Terlaksananya pembangunan yang sesuai dengan standar hidup masyarakat;
- e. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- f. Tertatanya tata ruang kota sesuai dengan rencana yang telah ada (RTRW).

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki lima bidang, yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Penataan Ruang, dan Bidang Bina Konstruksi. Bidang Bina Marga merupakan bidang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan. Bidang Bina Marga juga merupakan salah bagian untuk membantu Kepala Dinas yang di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki aturan, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis survei, investigasi dan desain bina marga, pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan. Adapun untuk

melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2016

bidang Bina Marga berfungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis dan program dibidang pengembangan sistem jaringan jalan dan jembatan;
- b. Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana jalan dan jembatan;
- c. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pengembangan jalan dan jembatan;
- d. Pengelolaan data dan penyusunan laporan bidang pengembangan prasarana jalan dan jembatan;
- e. Penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan keadaan darurat jalan dan jembatan baik akibat bencana alam maupun akibat lainnya;
- f. Penyelenggaraan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana jalan dan jembatan;
- g. Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa;
- h. Perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- i. Pembinaan, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- j. Pelaksanaa tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan survei, investigasi dan desain prasarana jalan dan jembatan;
- c. Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi survei, investigasi dan desain prasarana jalan dan jembatan;
- d. Penyelenggaraan survei, investigasi dan desain prasarana jalan dan jembatan;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data base di bidang bina marga;

- f. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan teknis prasarana jalan dan jembatan;
- g. Penyusunan dan perumusan program dan kegiatan di bidang bina marga;
- h. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan kepala bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi

Jalan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaran penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- c. Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- d. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- e. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dengan memperhatikan keserasian antar wilayah kabupaten/provinsi/Nasional;
- f. Penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa;
- g. Pembinaan kepada aparatur penyelenggara jalan di wilayah kabupaten;
- h. Penyiapan penyelenggaraan peningkatan jalan;
- i. Pengumpulan dan pengolahan data keadaan jalan;
- j. Pengelolaan serta penyiapan bahan petunjuk teknis;
- k. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan;
- l. Penyusunan dan perumusan program dan kegiatan di bidang jalan;
- m. Penyelenggaraan pengawasan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang bina marga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26,

Kepala Seksi Jembatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan rencana program kegiatan;
- b. Penyiapan penyelenggaraan pembangunan jembatan;
- c. Penyiapan penyelenggaraan penggantian jembatan;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data keadaan jembatan;
- e. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan jembatan;
- f. Pembiayaan pembangunan jembatan kabupaten;
- g. Penyusunan pedoman perencanaan pembangunan jembatan kabupaten;
- h. Penyelenggaran pengawasan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang bina marga.

BAB III

**KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM PEMBANGUNAN
JALAN DAERAH TAHUN 2016**

Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya. Dalam usaha pembangunan infrastruktur, pemerintah selalu berupaya meningkatkan kinerja untuk lebih membuat masyarakat sejahtera melalui program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan keinginan masyarakat serta aturan yang berlaku. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat yaitu dengan melakukan pembangunan infrastruktur jalan yang berguna bagi kegiatan atau aktivitas masyarakat.

Hal ini dilakukan karena masih banyaknya infrastruktur jalan di Indonesia khususnya di daerah-daerah kecil yang infrastruktur jalannya kurang memadai. Minimnya pelayanan ataupun fasilitas yang diberikan pemerintah mungkin menjadi salah satu penyebab masih adanya pembangunan infrastruktur jalan dibawah standar. Maka dari itu untuk mempermudah pelayanan pemerintah dalam hal infrastruktur jalan di Indonesia, pembangunan infrastruktur jalan ini menjadi salah program pemerintah untuk lebih mensejahterakan masyarakat di bidang jalan.

Adapun pembangunan infrastruktur jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat yang pembangunan

jalannya sejak tahun 2004 sampai tahun 2017 belum selesai dilaksanakan. Sedangkan jalan tersebut merupakan akses masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi ataupun kegiatan lainnya dari Kabupaten Kota menuju kecamatan dan bahkan ke Kabupaten tetangga. Maka dari itu, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barat selalu berusaha dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin lama cepat selesai dan dapat digunakan masyarakat dalam melakukan segala aktivitasnya.

Dengan demikian untuk mengukur Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaingin Barat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Daerah Tahun 2016 digunakan dengan beberapa indikator pengukuran kinerja, yaitu dengan menggunakan Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responibilitas, dan Akuntabilitas.

A. Produktivitas

Produktivitas merupakan konsep untuk menentukan suatu kemampuan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Produktivitas juga tidak lepas dari kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pemerintah Daerah yang terkait untuk menghasilkan masukan dan pengeluaran dalam melaksanakan program yang telah direncanakan. Semakin banyaknya pengeluaran yang dihasilkan, semakin baik juga produktivitas suatu kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat. Tetapi, semakin sedikit

pengeluaran yang diterima dan tidak sesuai dengan sasaran atau tujuan utama, maka semakin berkurangnya produktivitas yang dilaksanakan oleh pegawai-pegawai maupun suatu organisasi terhadap suatu program tersebut. Adapun kemampuan yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin barat dalam mencapai hasil yang di inginkan sesuai program, kemudian dalam menghasilkan masukan dan pengeluarannya.

Dalam pembangunan infrastruktur jalan ini, pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sangat serius dalam memfokuskan pembangunan jalan cepat selesai dan menentukan masukan maupun pengeluaran yang besar agar jalan tersebut dapat fungsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat (11 Januari 2018, Pukul 10.30 WIB) mengatakan :

“Dari segi input dan outputnya kita selaku Dinas Pekerjaan Umum menginginkan output yang besar dalam pembangunan jalan ini. Bahwasanya pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk membuka terisolasi daerah yang memudahkan masyarakat Pangkalan Bun dan Kotawaringin Lama dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Terbukti, setelah adanya jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama ini, masyarakat lebih mudah melakukan kegiatan sehari-hari maupun kegiatan perekonomian. Dan untuk sektor Pemerintahan pun, hubungan antara pihak Kecamatan Kotawaringin Lama dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat lebih mudah.”

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menginginkan output yang besar dalam pembangunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama. Hal ini pun terbukti bahwa Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dapat memberikan output yang besar, walaupun kenyataannya pembangunan jalan ini belum selesai keseluruhan. Namun, ini merupakan suatu bukti upaya yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat demi mempermudah segala aktivitas masyarakat dan di segala bidang pemerintahan dalam melakukan kegiatannya.

Adapun masukan yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ini dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan dari pangkalan bun ke kotawaringin lama adalah :

Masukan dalam sasaran Infrastruktur adalah dengan terjaminnya jaringan infrastruktur di seluruh daerah kabupaten untuk memperlancar aksesibilitas masyarakat dan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian. Dan saat ini adalah output yang dihasilkan Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan infrastruktur jalan dari pangkalan bun ke kotawaringin lama :

- a. Terbukanya isolasi daerah sehingga sampai ke kabupaten tetangga maupun ke provinsi kalimantan barat bisa terlayani dengan cara dinas PU membuka jalan yang panjangnya 41km.

- b. Kemudian selain itu tujuannya juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,
- d. Administrasi pemerintahan yang baik,
- e. Pelayanan kepada kependudukan, memudahkan dalam pelayanan sektor barang dan jasa,
- f. Menunjang pergerakan aksesibilitas masyarakat dari pangkalan bus ke kotawaringin lama.

Sumber : LAKIP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

Selain mengukur perbandingan kinerja pegawai dengan input atau output yang dihasilkan, kinerja juga dapat dilihat berdasarkan dengan menggunakan bagaimana kerja Dinas Pekerjaan Umum dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kepala seksi pembangunan jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat (11 Januari 2018, Pukul: 11.15 WIB) mengatakan :

“Jika bicara tentang produktivitas, kita juga membicarakan tentang usaha dalam mencapai pembangunan tersebut. Usaha yang sudah kita capai dalam pembangunan jalan pangkalan bus ke kotawaringin lama sudah direncanakan pada tahun 2003, dan mulai pembangunan pada tahun 2004, dan setiap tahun selalu menganggar dana yang signifikan besar, terutama yang terbesar pada tahun 2013-2015 karena kita melaksanakan pembangunan dengan metode multi yes untuk pembangunan jembatan layang sepanjang 2 km. Multi yes (pengerjaan tahun jamak, artinya tidak hampir di satu tahun anggaran. Dan pembangunan jalan pangkalan bus ke kotawaringin barat selalu terkerjakan sejak tahun dimulai pembangunan sampai tahun 2018 ini. Semenjak 2004 itu sudah membuat trase jalan, kemudian pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan perencanaan dan penganggaran yang berkelanjutan dari tahun ke tahun, kemudian di bantu oleh dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, dukungan dari APBN melalui fasilitasi jalan daerah Dana Alokasi Khusus.”

Menurut wawancara bersama Kepala Seksi Jalan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam upaya mencapai pembangunan jalan Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama segera selesai, pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang selalu menganggarkan dana yang besar setiap tahunnya demi mengejar terselesaikannya jalan tersebut. Tentunya ini merupakan bentuk keseriusan pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam mengupayakan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kotawaringin Barat melakukan upaya demi menanggulangi banjir di satu spot jalan yang secara keseluruhan merupakan rawa dengan membangun jembatan panjangnya sekitar 2 km menggunakan pembangunan secara multi yes.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pembangunan infrastruktur jalan dari segi produktivitas dapat dilihat kemampuan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pembangunan jalan ini sudah baik dan telah memberikan pengeluaran yang besar terhadap masyarakat. Terbukti dengan adanya pembangunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama ini membuka keterisolasian daerah yang mana berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, memudahkan aktivitas masyarakat dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin lama atau sebaliknya, dan juga memudahkan Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan apapun yang dibutuhkan masyarakat. Tentunya ini merupakan suatu hasil yang telah dicapai pihak Dinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat untuk selalu mensejahterahkan masyarakat dalam bidang apapun. Dan menurut penulis, apa yang telah didapat dari pengeluaran ini adalah suatu cara untuk memajukan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat lebih baik lagi, karena suatu daerah dapat maju tidak terlepas dari infrastruktur yang memadai.

Kemudian dalam mencapai hasil yang di inginkan, pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sejak pembangunan jalan pada tahun 2004 sampai Tahun 2018 selalu menganggarkan dana setiap tahun supaya dalam pembangunan ini berjalan sesuai dengan keinginan. Tentu saja dengan selalu mangaggarkan dana setiap tahunnya, berarti pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang selalu berupaya terus agar pembangunan jalan ini selalu berjalan dan membuktikan jika Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat serius dalam pembangunan jalan. Berdasarkan observasi penulis, usaha yang dicapai telah dilakukan, terbukti adanya penambahan aspal jalan dan menambal jalan yang sering berlumpur apabila hujan turun. Dan juga salah satu usaha yang telah dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu melakukan pembangunan dengan metode multi yes untuk jembatan layang yang notabene keadaan nya merupakan danau. Dan berdasarkan observasi lapangan, jembatan layang ini sudah terbangun sepanjang 2 km dan rencananya pada tahun 2018 ini akan di tambah panjang jembatan layang sepanjang 3 km yang tentu dampaknya sangat bermanfaat untuk menghindari

jalan sekitar jembatan yang masih terkena banjir. Juga sudah terealisasinya sebagian jalan yang beraspal agar masyarakat bisa dapat menggunakan jalan tersebut. Tentu saja dalam pandangan penulis, usaha yang telah dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengolah jalan supaya selalu fungsional dilalui masyarakat sudah sangat baik dan efektif demi tercapainya pembangunan jalan sesuai yang di inginkan.

B. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan salah satu indikator dalam menentukan kinerja suatu organisasi. Pandangan positif maupun pandangan negatif selalu bermunculan dari masyarakat apabila dirasa pelayanan yang diberikan oleh pihak suatu instansi pemerintah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan bahkan tidak membuat masyarakat merasa puas. Maka dari itu, sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat, hendaknya setiap suatu organisasi mengetahui terlebih dahulu bagaimana peran, tugas, atau wewenang yang di berikan agar dapat membuat masyarakat merasa puas dengan kerja dari suatu organisasi sendiri.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat (11 Januari 2018, Pukul 10.30 WIB) mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, kami selaku Dinas PUPR melaksanakan pemeliharaan

jalan sepanjang tahun supaya pelayanan transportasi yang melewati jalan pangkalan bun ke kotawaringin lama bisa dilaksanakan tanpa hambatan apapun dan masyarakat merasa puas akan pelayanan dalam pembangunan jalan tersebut”.

Melihat penjelasan dari Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat mengenai pelayanan yang di berikan kepada masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat selalu mengupayakan agar jalan dapat selalu digunakan oleh masyarakat dengan melakukan pemeliharaan jalan tiap tahunnya. Karena apabila di lakukan pemeliharaan jalan tiap tahun, kondisi jalan sedikit demi sedikit dapat meminimasisir kerusakan jalan bertambah parah. Dan dalam hal pemeliharaan jalan tiap tahun tentunya dapat membuat masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang telah diberikan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pembangunan jalan dari Pangkalan Bun menuju ke Kecamatan Kotawaringin Lama.

Tabel 3.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Pelayanan Umum
Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Bidang
Bina Marga Tahun 2016

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Tahun 2011	Taerget Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2016
			Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
1	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	0,13	0,14	0,18	0,21	0,24	0,27	0,27
2	Rasio Jaringan dalam Kondisi Baik	0,52	0,57	0,62	0,67	0,73	0,79	0,79
3	Presentase Rumah Tinggal Bersantiasi (%)	93,82	93,82	94,81	95,79	96,78	97,79	97,79
4	Rasio Tempat Pemakaman Umum Persatuan Penduduk	771,8	771,8	771,8	771,8	771,8	771,8	771,8
5	Rasio Tempat Pembuangan Sampah	2,32	2,32	4,2	5,2	6,2	7,5	7,5
6	Rasio Rumah Layak Huni	0,59	0,60	0,61	0,63	0,64	0,65	0,65
7	Rasio Permukiman Layak Huni (%)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
8	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (km)	2.405,26	2.450,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.650,00

Sumber : RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, bahwa pelayanan yang telah dilakukan
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat

kepada masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur jalan setiap tahun meningkat dari mulai tahun 2011 sampai 2016. Dapat dilihat pada fokus proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, peningkatannya sangat signifikan. Yang pada periode tahun 2011 persentasenya hanya 0,13% , dan pada tahun 2016 akhir periode RPJMD meningkat menjadi 0,27%. Kemudian untuk fokus pada panjang jalan dilalui roda 4 yang dihitung dengan menggunakan kilometer, pada awal periode tahun 2011 hanya 2.405,00 km saja, dan pada akhir periode RPJMD tahun 2016 meningkat menjadi 2.650,00 km. Tentu saja ini merupakan usaha yang selalu dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat untuk selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang jalan agar masyarakat mudah menggunakan jalan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kemudian ditambahkan oleh narasumber lain yaitu Kepala Seksi Pembangunan Jembatan dan jalan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat (11 Januari 2018, Pukul 11.15 WIB) mengatakan bahwa :

“kita tentunya respon mas dalam melayani masyarakat, kita selalu gunakan berbagai alternatif-alternatif atau penanganan tentunya dalam rangka memuat jalan itu dapat fungsional mantap. Sebagaimana motto kami, anda bisa lihat (Bekerja keras, bekerja cepat, bekerja tepat).Tentunya bukan hanya untuk jalan Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama, semua jalan. Karena kita punya penanganan perkecamatan tadi seperti yang saya sampaikan, beberapa usaha kita lakukan, seperti kita menimbun jalan yang berlobang, kita lakukan untuk membuatkan jalan-jalan sementara untuk perbaikan untuk memberikan rasa kepuasan pada masyarakat.Jadi contoh seperti

hari-hari tertentu misalnya, seperti hari idul fitri, natal, tahun baru, kita menempatkan personil kita stand by disana jika ada bagian jalan yang memang tidak bisa dilalui karena rusak”.

Melihat dari penjelasan yang di sampaikan oleh Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat selalu respon dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar jalan tersebut dapat selalu fungsional. Tentu saja dalam pandangan penulis, upaya yang telah dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah baik dan tepat. Karena berdasarkan observasi lapangan yang telah dilakukan penulis, jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin lama keadaannya memang belum semuanya layak untuk dilalui. Karena masih ada di beberapa spot jalan yang masih rusak. Apalagi ketika hujan turun seharian, akan membuat jalan bergenang dan becek. Maka dari itu, pihak Dinas Pekerjaan Umum selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menambal jalan rusak itu dengan material yang lebih kuat, untuk meminimalisir jalan rusak kembali ketika hujan turun.

Adapun usaha yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang untuk membuat jalan yang berlubang atau rusak tersebut menjadi fungsional untuk masyarakat yang melaluinya, seperti foto dibawah ini :

Gambar 3

Pelayanan Yang Diberikan Dinas Pekerjaan Umum Untuk Masyarakat Dalam Memperbaiki Jalan Yang Rusak



Sumber : Dokumentasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat

Dari foto di atas merupakan salah satu usaha Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melayani masyarakat agar jalan dapat selalu fungsional. Terbukti Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat selalu mengupayakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan perbaikan jalan untuk membuat masyarakat terlayani dengan adanya perbaikan jalan yang rusak dari Kabupaten Kotawaringin Barat menuju ke Kecamatan Kotawaringin Barat.

Kemudian ada dua narasumber perwakilan dari masyarakat yang memang merasakan jalan serta yang memiliki peran terpenting dalam pembangunan jalan ini memiliki dua penilaian yang sama dalam menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Adapun penilaian dari narasumber terkait pelayanan yang diberikan

menurut Kepala Camat Kotawaringin Lama (15 Januari 2018 WIB, Pukul 13.30)

mengatakan :

Pelayanan yang diberikan Dinas PU itu yang seperti pemeliharaan ada terus, meskipun kondisinya belum jadi, Cuma ada usaha-usaha dinas PU melalui penganggaran yang sifatnya pemeliharaan. Pemeliharaan disini maksudnya memang kondisi jalan sudah jadi, tapi di pelihara ini supaya tetap fungsional agar tetap bisa di lewati oleh masyarakat. Baru setengah tahun ini saja yang bisa normal seperti ini. Kalau setahun kebelakang pada tahun 2016 kemaren saat musimnya rusak itu, wah setengah mati untuk di lewati, kondisinya rusak parah. Jadi Dinas PU itu meskipun proyeknya benar-benar pengerjaannya belum jalan, belum mulai, dan baru mulai disekitar pertengahan tahun 2017. Sebelum itu berusaha entah di timbun sedikit-sedikit atau di great, supaya masyarakat masih bisa mengakses jalan tersebut.

Berbeda dengan narasumber kedua yang berpendapat bahwa pelayanan dalam peningkatan jalan yang diberikan pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang kepada masyarakat sudah baik, tetapi dalam tahap pembangunannya cenderung lama. Tetapi setelah ada pengerasan jalan, masyarakat terlayani dengan dapat menggunakan jalan tersebut.

Tokoh Masyarakat Kecamatan Kotawaringin Lama (15 Januari 2018, Pukul 11.10 WIB) mengatakan bahwa :

Untuk pelayanan yang diberikan mungkin adanya peningkatan jalan. Yang awalnya tidak ada jalan sudah ada jalan. Sistemnya saja mungkin yang sedikit kita harapkan selesai jadi langsung di pakai. Tapi kenyataannya di lapangan seperti jalan-jalan kita yang ada ini dapat 1 km aspal, kemudian baru tahun depan lagi jika dapat 1 km atau 2 km pengerasan ada aspalnya, jadi tidak merata selesainya. Akhirnya masih banyak yang kita rasakan di daerah tertentu itu yang belum sempurna yang belum bisa di lewati. Yang kita rasakan saat ini mungkin yang sudah di aspal, sudah ada pengerasan alhamdulillah

jalan ini udah lumayan enak dan bisa kita lewati, baik kendaraan roda 4 atau sepeda motor .

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dalam pembangunan infrastruktur jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama, dapat dikatakan kemampuan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dari segi aspek kualitas pelayanan sudah cukup baik. Terbukti dengan adanya pelayanan dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat meningkatkan kondisi jalan dengan cara melakukan pembangunan jalan terus menerus dari tahun 2011 sampai 2016 untuk membuat kondisi jalan lebih baik. Kemudian adanya pemeliharaan jalan tiap tahun yang mana pemeliharaan ini bertujuan untuk membuat jalan terus fungsional di gunakan masyarakat dan tentunya sangat berperan penting bagi kelancaran masyarakat melalui jalan tersebut dalam melakukan segala aktifitasnya. Juga dengan adanya ketanggapan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menurunkan personilnya ketika jalan sedang rusak, sangat membantu masyarakat apabila ada suatu kendala yang dirasakan masyarakat ketika melalui jalan tersebut dan masyarakat merasa terlayani dengan baik oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.

Hanya saja menurut penulis, usaha Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan pengerasan jalan dari tanah ke aspal sedikit lamban, bertahap dari tahun ke tahun itu tidak merata pengaspalannya yang

membuat jalan dengan mudah rusak apabila turun hujan dan pembangunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Barat ini akan lebih lama lagi waktunya. Tentu saja hal ini membuat pembangunan jalan menjadi lamban, karena jalan yang masih berbahan tanah akan rusak kembali apabila hujan turun dan dilalui kendaraan berbeban melebihi batas maksimal.

C. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan suatu organisasi untuk lebih memahami dan mengetahui apa yang di inginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat yang kemudian disusun menjadi sebuah program kegiatan dan menjadikan kegiatan tersebut menjadi program prioritas utama untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan masyarakat agar lebih sejahtera. Dapat di artikan bahwa responsivitas merupakan daya tanggap dan daya tangkap Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memahami dan menanggapi keinginan serta kebutuhan masyarakat agar jalan tersebut dapat dilalui dan fungsional.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat (11 Januari 2018, Pukul 10.30 WIB) mengatakan :

“kita sudah antisipasi sejak dini, maka kita sangat responsif terhadap seluruh keluhan masyarakat, maupun dari media massa itu menjadi bagian mitra kerja dinas PUPR yang diharapkan bisa mengoreksi atau memberikan informasi untuk pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas PU. Ketika keluhan atau kritik dari masyarakat tentang pembangunan jalan tersebut rusak, pihak dinas PU juga langsung mengirimkan alat, mengirimkan tenaga, mengirimkan

material, supaya masyarakat itu bisa terlayani dengan baik. Kemudian di kotawaringin barat ini ada 6 kecamatan, dan itu di tangani oleh kecamatan arut selatan dan kecamatan kotawaringin lama. Kita bersinergi berbagai usaha kita tempuh melalui penanganan kontraktual, ketika kontraktual sudah selesai kita lakukan dengan penanganan swakelola, dan kita lakukan penanganan-penanganan supaya jalan itu dapat di nikmati dengan nyaman dan aman oleh masyarakat”.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat diatas, bahwa Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menganggap dengan adanya media massa dalam proses pembangunan jalan ini sangat berperan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat. Karena dari media massa, pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menjadi tau apasaja yang di inginkan masyarakat untuk pembangunan ini dan keluhan masyarakat ketika jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama rusak. Tentu saja ini sangat baik, pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi lebih tanggap.

Adapun juga kemampuan dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memenuhi kritik dan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan jalan ini agar dapat dilalui oleh masyarakat tanpa hambatan apapun. Karena sebageian jalan yang rusak itu akibat adanya kendaraan roda 6 atau lebih melalui jalan tersebut sehingga membuat jalan jadi berlubang dan rusak, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Seksi jalan dan

jembatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat (11 Januari 2018, Pukul 11.15 WIB) :

“Dan juga yang menjadi kritik dan keluhan masyarakat kepada Dinas Pekerjaan umum adalah masih banyaknya kendaraan-kendaraan berat yang seharusnya tidak lewat situ, padahal kita sudah pasang rambu, artinya kendaraan roda 6 atau lebih, kecuali kendaraan proyek tidak boleh melewati jalan itu. Kemudian kita merealisasikan keinginan masyarakat untuk membuat portal jalan untuk kendaraan roda 6 atau lebih dilarang melalui jalan itu disana. Karena jalan tanah itu kan maksimal beban yang mampu di dukung maksimal 4 ton atau 5 ton saja. Karena masih ada beberapa sekian kilometer yang hampir 50% masih jalan tanah, dan selalu kita tingkatkan tiap tahunnya agar masyarakat dapat melaluinya. Masyarakat pun tentunya sangat mengharapkan jalan tersebut segera selesai dan dapat dilalui.”

Menurut hasil wawancara bersama Kepala Seksi Jalan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa hal yang menjadi kritikan dan keluhan masyarakat dalam pembangunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama salah satunya adalah masih banyaknya kendaraan roda enam atau lebih dengan beban di atas maksimum 5 ton masih melalui jalan tersebut. Karena apabila kendaraan roda enam atau lebih tersebut melalui jalan yang masih dalam proses pembangunan akan membuat jalan tersebut semakin berlubang dan rusak kembali. Karena sebagian besar jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama masih berbahan dasar tanah dan masih rawan dilalui kendaraan yang berbeban di atas maksimum. Tentu saja hal ini akan membuat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melakukan upaya pembangunan berkali-kali demi memperbaiki jalan yang rusak akibat kendaraan roda enam tersebut dan membuat proses pembangunan jalan lebih lama.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber mengenai responsivitas dalam memenuhi keinginan dan menanggapi segala keluhan masyarakat sudah baik. Dapat dilihat kemampuan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang selalu tanggap apabila ketika ada kritikan dari masyarakat terhadap jalan yang rusak, pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang langsung menurunkan alat berat, mengirimkan material untuk memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang. Tentu saja dengan kegiatan yang tanggap ini membuat masyarakat merasa puas ketika kritikan mereka langsung di respon dengan cepat dan dapat meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barat dalam upaya menyelesaikan pembangunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama

Kemudian dalam menanggapi keluhan masyarakat apabila ada kendaraan roda 6 atau lebih yang melalui jalan tersebut membuat jalan menjadi rusak. Hal ini terbukti dengan adanya pemasangan portal dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang di bagian jalan dari arah Pangkalan Bun dan bagian jalan dari arah Kotawaringin Lama. Yang mana dengan memasang portal dapat membuat kendaraan roda 6 atau lebih tidak bisa melalui portalnya yang memiliki kapasitas tinggi kendaraan yang boleh dilalui. Dan juga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang memasang rambu atau papan pemberitahuan kalau kendaraan tersebut tidak boleh melewati jalan yang masih dalam tahap pemeliharaan.

D. Responsibilitas

Membahas tentang responsibilitas, dalam penelitian ini responsibilitas berhubungan dengan melaksanakan program sesuai dengan visi dan misi maupun ketentuan organisasi yang berkaitan terhadap kinerja untuk mensejahterakan pelayanan kepada masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan ini. Dalam responsibilitasnya pun Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sudah melakukan pembangunan sesuai dengan visi maupun misi dari Dinas Pekerjaan Umum tersebut, dan juga pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melaksanakan pembangunan ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat (11 Januari 2018, Pukul 10.30 WIB) mengatakan bahwa:

“Sudah jelas program ini dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi dari dinas Pekerjaan Umum sendiri mas. Tentunya dalam pembangunan infrastruktur jalan ini dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran khusus dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan dari visi dan misi tersebut”.

Menurut hasil wawancara di atas dengan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat ialah dalam pembangunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi yang sesuai dengan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Tentu saja dalam hal ini, pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam melakukan

kegiatan pembangunan jalan dilakukan secara terarah dan fokus kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran yang telah dicapai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam melaksanakan Pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 adalah :

Tabel 3.2

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di daerah perkotaan dan perdesaan

Sasaran	IKU	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di daerah perkotaan dan perdesaan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,27	0,45	166,67

Sumber : Lakip Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

Selain dari visi dan misi yang menjadi acuan bagi usaha Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam pembangunan jalan ini, ada juga ketentuan khusus yang tertuang dalam petunjuk teknis untuk sebagai acuan agar arah pembangunan jalan ini menjadi lebih baik sesuai dengan ketentuan yang berhubungan dengan keinginan masyarakat. Kepala seksi pembangunan jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat (11 Januari 2018, Pukul 11.15 WIB) mengatakan :

Untuk pembangunan jalan ini kita ada ketentuannya mas, kita mengikuti ketentuan sesuai dengan petunjuk teknis, artinya dalam Undang-Undang ada Peraturan Pemerintah ya ada petunjuk teknisnya lagi. Kemudian juknis-juknis yang detail sendiri sesuai dengan ketentuan teknis. Artinya ketentuan-ketentuan yang mengatur diatur lebih rinci di juknis itulah. dan dalam pembangunannya sesuai juknis dari kementerian.

Melihat dari hasil wawancara bersama Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jalan mengikuti ketentuan yang berlaku. Yang mana ketentuan ini merupakan petunjuk teknis yang dikeluarkan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini tentunya dapat membuat pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melakukan kegiatan pembangunan secara tersusun dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi untuk mensejahterakan masyarakat dalam bidang infrastruktur.

Adapun pelaksanaan pembangunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama yang telah dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang metoda pelaksanaan sebagai berikut :

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur dapat dilaksanakan dengan mengacu pada:

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

- b. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya;
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi.

Dalam Pekerjaan pemeliharaan jalan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama berpedoman pada Standar dan Pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut :

Kegiatan pemeliharaan berkala, meliputi jenis pekerjaan:

A. Pada panjang efektif:

- a. Perbaikan permukaan perkerasan (lubang, retak amblas, dll);
- b. Pembentukan/ Pelapisan ulang permukaan perkerasan (agregat, campuran aspal);
- c. Perbaikan permukaan bahu jalan (penambahan material dan pemadatan/perataan);

d. Pembuatan/Perbaiki drainase/saluran tepi jalan dan gorong gorong;

e. Penggantian, rambu/perengkapan jalan.

B. Pada panjang fungsional, jenis pekerjaan yang dilakukan seperti kegiatan pemeliharaan rutin.

Kemudian dalam Pekerjaan peningkatan jalan, Dinas Pekerjaan Umum juga telah melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama berupa peningkatan/perkuatan struktur atau peningkatan kapasitas lalu lintas berupa pelebaran jalur lalu lintas. Pekerjaan peningkatan juga dapat berupa peningkatan dari jalan tanah ke jalan kerikil/jalan aspal atau dari jalan kerikil/agregat ke jalan aspal. Adapun kegiatan peningkatan jalan tersebut meliputi:

A. Pada panjang efektif :

- a. Perbaiki permukaan perkerasan (Lubang, retak, amblas, dll);
- b. Persiapan lapis pondasi diatas perkerasan lama (agregat, campuran aspal/ATB);
- c. Pelapisan permukaan aspal;
- d. Penambahan material bahu jalan dan pemadatan atau menyesuaikan permukaan perkerasan;
- e. Perbaiki drainase/saluran tepi jalan dan gorong gorong;
- f. Pemotongan rumput, pembersihan ruang milik jalan;
- g. Penggantian, perbaikan atau pembersihan dan pengecatan rambu/perengkapan jalan.

B. Pada panjang fungsional, jenis pekerjaan yang dilakukan seperti kegiatan pemeliharaan rutin.

Pada peningkatan jalan berupa pelebaran, jenis pekerjaannya meliputi:

A. Pada daerah pelebaran :

- a. Persiapan tanah dasar/subgrade (galian / timbunan tanah / material dan pembentukan / pemadatan);
- b. Perataan atau leveling perkerasan lama (agregat, campuran aspal/ATB);
- c. Pelapisan permukaan perkerasan aspal.

B. Pada daerah perkerasan lama :

- a. Perbaikan permukaan perkerasan (lubang,retak,amblas, dll);
- b. Persiapan lapis pondasi diatas perkerasan lama (agregat, campuran aspal/ATB);
- c. Pelapisan permukaan perkerasan aspal.

C. Pada daerah diluar perkerasan :

- a. Penambahan material bahu jalan dan pemadatan atau penyesuaian pelebaran perkerasan;
- b. Perbaikan drainase/saluran tepi jalan dan gorong-gorong;
- c. Pemotongan rumput dan pembersihan ruang milik jalan;
- d. Penggantian, perbaikan atau pembersihan dan pengecatan rambu atau perlengkapan jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Kepala Bidang Bina Marga dan Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat mengenai responabilitas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang di inginkan. Terbukti setelah adanya jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama, masyarakat lebih mudah untuk melakukan segala kegiatan. Melihat dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, kelancaran distribusi barang dan jasa. Dan juga dalam pembangunan infrastruktur jalan ini Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan pembangunan sesuai prosedur petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Yang mana prosedur ini menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan secara terarah dan tidak sembarangan asal jadi saja. Hal ini tentunya dapat membuat pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melakukan kegiatan pembangunan secara tersusun dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi untuk mensejahterakan masyarakat dalam bidang infrastruktur.

E. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam memberikan tanggung jawab dan keterbukaan merupakan hal yang penting dalam melaksanakan program suatu organisasi. Tanpa adanya tanggung jawab, setiap pegawai dalam suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program menjadi tidak terkontrol dan dapat menyebabkan tidak tercapainya sebuah tujuan yang diinginkan. Kemudian keterbukaan juga menjadi suatu hal terpenting dalam melaksanakan program atau kegiatan, baik keterbukaan kegiatan antara pegawai dengan masyarakat, maupun keterbukaan antara atasan dengan pegawai dan keterbukaan antara sesama pegawai. Kedua hal tersebut sangat penting untuk dilaksanakan dan dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan yang dilakukan agar nantinya dapat memberikan rasa kepercayaan terutama kepada masyarakat untuk memberikan kenyamanan dan kesejahteraan dalam pembangunan infrastruktur jalan ini.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat (11 Januari 2018, Pukul : 10.30 WIB) mengatakan :

tentunya dari segi pertanggung jawaban sendiri kami ada namanya pengawasan internal dan eksternal. Pengawas internal itu kan oleh inspektorat selaku apip (aparatus pengawasan internal pemerintah), juga dari eksternal ada BPKP. Setiap tahun tentunya kami membuat laporan penyampaian aset, penyampaian kinerja segala macam, itu dituangkan bukan hanya di dinas PU saja, tetapi dituangkan didalam ketentuan adanya laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah. Jadi akuntabilitasnya ya tentunya sesuai ketentuan yang dapat di pertanggung jawabkan. Kita juga diawasi oleh internal, oleh eksternal. Dan untuk transparansi, dari proses lelang kita transparan, terbuka melalui lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE), dalam pelaksanaan kontrak kita tentunya

menyurati pihak kecamatan dan desa terkait pelaksanaan proyek, kemudian dalam pelaksanaannya kita juga memasang papan nama proyek. Jadi kita terbuka semua, mana dokumen yang bisa disampaikan ke publik, itu kita buka. Tapi kan ada dokumen yang sifatnya rahasia misalnya dokumen kontrak itu tidak boleh”.

Menurut hasil wawancara bersama Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam segi pertanggung jawaban dengan diawasi oleh pihak internal dan eksternal seperti Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan setiap tahunnya. Jadi dapat dikatakan bahwa akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sangat terjamin karena selalu memberikan laporan kepada pihak pengawas. Tentu saja hal ini dapat membuat kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan infrastruktur jalan jauh lebih baik.

Kemudian untuk transparansi kepada masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang selalu transparan, seperti proses lelang yang dimasukkan dalam Lembaga Pengadaan Secara Elektronik, mempublikasi dokumen yang memang dapat dilihat oleh masyarakat, dan memasang papan informasi kegiatan pembangunan di sepanjang jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama. Hal ini merupakan upaya keterbukaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang kepada masyarakat agar masyarakat berhak tau informasi kegiatan pembangunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama. Tentu saja keterbukaan ini sangat baik untuk masyarakat, secara tidak langsung masyarakat menjadi tau informasi tentang proses pembangunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan observasi lapangan bahwa akuntabilitas yang menyangkut aspek keterbukaan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Pembangunan Jalan Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama sudah dilakukan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan telah adanya usaha dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempublikasikan dokumen-dokumen yang dapat dilihat oleh masyarakat, memperlihatkan proses lelang di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik, dan memasang papan informasi yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang untuk melaksanakan pembangunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama ini. Dan menurut pandangan penulis, hal ini sangat baik, karena untuk memberikan informasi dan keterbukaan antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dengan masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan pembangunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama.

Kemudian dari segi tanggung jawab, pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sudah sangat baik. Karena telah dibuktikan pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Setiap tahun membuat laporan penyampaian aset, penyampaian kinerja, itu dituangkan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan dituangkan didalam ketentuan adanya laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kabupaten Kotawaringin Barat sangat terjamin karena selalu memberikan laporan kepada pihak pengawas. Tentu saja hal ini dapat membuat kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam pembangunan infrastruktur jalan jauh lebih baik.

Adapun laporan pertanggung jawaban yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam pembangunan infrastruktur jalan Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama setiap tahun nya yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 :

Adapun perbandingan capaian kinerja sejak tahun 2012 dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang di tahun 2016 :

Tabel 3.3

Perbandingan capaian kinerja sejak tahun 2012 dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari Dinas Pekerjaan Umum di tahun 2016

Sasaran	IKU	Capaian Kinerja (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di daerah perkotaan dan perdesaan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	97,5 8	54,7 8	94,8 2	185,7 3	166,6 7

Sumber : LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2016

Capaian kinerja tahun 2012 sampai 2014 selalu dibawah target yang direncanakan namun mulai tahun 2015 dan 2016 melebihi target yang telah direncanakan dalam rencana strategis (Renstra SKPD). Pada tahun 2016 pencapaian kinerja ini didukung melalui program dan kegiatan berikut :

- a. Program pembangunan jalan dan jembatan, dimana sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.217.165.622.286,- dengan realisasi anggaran Rp. 216.471.989.610,- (99,68%) dan secara fisik telah direalisasikan 100% pada 4 kegiatan yaitu pembangunan jalan, pembangunan jembatan, peningkatan jalan, dan peningkatan jalan lingkungan pemukiman. Pembangunan jalan pada tahun 2016 ditargetkan 24 paket dan secara keseluruhan terealisasi 100%. Melalui program ini juga telah dilaksanakan pembangunan jembatan sebanyak 20 paket, peningkatan jalan 18 paket dan peningkatan jalan lingkungan pemukiman sebanyak 110 paket. Program ini memberikan efisiensi anggaran senilai Rp. 693.632.676,- atau 0,32%.
- b. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dimana sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 2.745.512.350,-dengan realisasi anggaran Rp. 2.738.635.250,- (99,75%) dan secara fisik telah direalisasikan 100% pada 2 kegiatan yaitu rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan. Program ini dimaksudkan untuk menangani pemeliharaan jalan dan jembatan yang tersebar di seluruh kecamatan. Pemeliharaan tersebut berupa pemeliharaan yang

dilakukan secara rutin maupun periodik meliputi pemeliharaan jalan 3 paket dan pemeliharaan jembatan 6 paket. Program ini memberikan efisiensi anggaran senilai Rp. 6.877.100,- atau 0,25%.

- c. Program penyusunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, dimana sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.146.098.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 145.178.000,- (99,37%) dan secara fisik telah direalisasikan 100% pada 2 kegiatan yaitu penyusunan sistem informasi/data base jalan dan penyusunan sistem informasi/data base jembatan. Output dari program ini berupa penyediaan dokumen hasil survey kondisi jalan dan jembatan yang mana dokumen tersebut menjadi data base guna menunjang perencanaan pembangunan yang lebih terarah. Program ini memberikan efisiensi anggaran senilai Rp. 9220.000,- atau 0,63%.
- d. Program pembangunan infrastruktur perdesaan, dimana sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.6.599.497.900,- dengan realisasi anggaran Rp. 6.573.636.100,- (99,60%) dan secara fisik telah direalisasikan 100% pada 2 kegiatan yaitu rehabilitasi jalan dan jembatan perdesaan serta peningkatan jalan perdesaan. Melalui program ini telah direalisasikan rehabilitasi jalan dan jembatan perdesaan 8 paket, dan peningkatan jalan perdesaan 18 paket. Program ini memberikan efisiensi anggaran senilai Rp. 37.242.800,- atau 0,54%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pembangunan infrastruktur jalan daerah tahun 2016 dengan menggunakan lima indikator kinerja yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responibilitas, dan akuntabilitas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sudah lumayan baik. Berdasarkan dari

1. Segi Produkivitas sudah baik karena Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat telah membuka keterisolasian daerah untuk memudahkan segala aktivitas masyarakat maupun pemerintahan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama ataupun sebaliknya, Tentu saja hal ini sangat berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat kabupaten Kotawaringin Barat. Dan usaha dalam mencapai hasil yang diinginkan, dengan selalu menganggarkan dana setiap tahunnya untuk pembangunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama agar kegiatan pembangunan jalan tersebut segera selesai.

2. Segi Kualitas Pelayanan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya pelayanan dalam peningkatan kondisi jalan terus menerus setiap tahunnya menjadi lebih baik. Tentu saja apa yang telah dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan bentuk keseriusan dalam melayani masyarakat untuk lebih nyaman ketika menggunakan jalan daerah. Namun dalam kegiatan meningkatkan kondisi jalan dari tanah menjadi aspal disepanjang jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama tidak merata dan lamban. Hal ini tentunya akan membuat kondisi jalan yang masih tanah menjadi lebih rentan rusak dan membuat Dinas Pekerjaan Umum kewalahan dalam proses penyelesaian jalan.
3. Segi Responsivitas, kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memenuhi dan merespon keinginan masyarakat sudah sangat baik. Hal ini terbukti ketika masyarakat mengeluhkan jalan yang rusak dan tidak dapat dilalui, pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang langsung tanggap untuk melakukan tindakan agar jalan tersebut dapat dilalui. Ini merupakan upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menanggapi segala keinginan masyarakat.
4. Segi Responibilitas yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan pembangunan jalan dengan

mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku sudah sangat baik. Dapat dilihat dari pembangunan jalan Pangkalan Bun ke Kotawaringin Barat yang dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang infrastruktur jalan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan tentang pembangunan jalan.

5. Segi Akuntabilitas sudah baik dan maksimal. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat terlihat dari laporan yang setiap tahun selalu di berikan kepada pihak pengawas internal dan eksternal agar segala kegiatan dalam pembangunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama selalu terawasi dan tidak sembarangan dalam melakukan kegiatan pembangunan. Dan transparansi antara pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap masyarakat sudah sangat baik. Dengan adanya bentuk transparansi ini tentunya membuat masyarakat merasa tidak ada hal-hal yang di tutupi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan jalan dari Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Kecamatan Kotawaringin Lama.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu :

- a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat harus lebih serius dalam melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan

dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama agar pembangunan jalan tersebut dapat segera selesai dan digunakan masyarakat untuk melakukan segala aktivitas.

- b. Dalam memenuhi keinginan dan keluhan masyarakat terhadap jalan yang masih rusak, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat harus lebih tanggap dan bergerak cepat agar tidak ada lagi keluhan atau kritikan dari masyarakat.
- c. Pemerataan pengerasan jalan lebih merata dari wilayah Pangkalan Bun ataupun dari wilayah Kotawaringin Lama dan Lebih meningkatkan kualitas jalan yang selama ini dalam tahap pembangunan agar tidak mudah rusak.
- d. Lebih meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan roda 6 atau lebih yang dapat merusak jalan ketika melalui jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kencana, I. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. (2007). *Manajemen sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan manajemen pegawai negeri sipil*. Refika Aditama.
- Sinambela, L. P. (2012). *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, B. (2013). *Etika Pembangunan*. Pringwulung: Caps Publishing.

Jurnal

- Adianto, M. (2013). *Analisis Kinerja Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Dengan Pendekatan Balance Scorecard*. Doctoral dissertation, Universitas Terbuka.
- Ardhana, N. S. (2014). Efektifitas Pasal 13 Jo Pasal 14 Huruf (D) Peraturan Walikota Surabaya No. 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya Terkait Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Surabaya. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1.2*.
- Astono, J. D. (2013). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Melalui Disiplin Kerja Karwayan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Sains Manajemen* , Volume 2.
- Astunik, W. (2015). *Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jalan*. Bandar lampung: Doctoral dissertation FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK.
- Asudin, A. (2012). Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat. *SMARTek* , 293.

- Azhari, A., & Majid, I. A. (2014). *Faktor–Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Kinerja Kontraktor Pada Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Di Kabupaten Aceh Jaya*. Jurnal Teknik Sipil Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, 3.1.
- Chitrasari, N. (2012). *Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Cilegon*. Serang: Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Christin Dessy Sahudege, B. K. (2015). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. *Jurnal Administrasi Publik* , 4. 32.
- Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Iek, M. (2013). Analisa Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Pedalaman May Barat Provinsi Papua Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* , 6.1.
- Kurniati, Y. I. (2012). *Analisis Kinerja Pelayanan Publik Aparatur Pemerintah Pada Kantor Camat Labuhan Badas Kecamatan Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Dotoral Dissertation, Universitas Terbuka.
- Linda Utami, R. S. (2016). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang. *Jurnal Praktik Bisnis* , Volume 4, Nomor 1.
- Musaddad, I. (2016). Produktivitas Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Pada Tahun 2015).
- Nur, F., Bulkis, S., & Naping, H. (2010). *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa*. Doctoral dissertaion, Universitas Hasanudin
- Permana, R. A. (2010). *Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pembangunan Prasarana Daerah Di Kabupaten Purworejo Tahun 2006-2008*. Yogyakarta: Skripsi UMY.
- Posumah, F. (2015). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* , 5.
- Rahman, O. (2016). *Persepsi Politik Etnis*. Yogyakarta.

- Riny. (2016). Kinerja Aparatur Pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis* , 4. 2.
- Rozi, B., Nugroho, K. S., & Jumiati, I. E. (2016). *Penerapan Prinsi-Prinsip Good Governance Pada Proyek Pembangunan Jalan Di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, Provinsi Banten* Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Santoso, D. (2017). *Kinerja Aparatur Pemerintah Di Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat*. Semarang: Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Syaiin, S. (2008). *Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Klinik Spesialis Bestari Medan Tahun 2007*. Medan: Doctoral Disertation.
- Widiaswari, R. R. (2016). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Banjar Baru. *JURNAL SPREAD* , Volume 2 Nomor 3.
- Yohanes F.C. Ransun, F. K. (2017). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Daerah. *Jurnal Eksekutif* , 3-6.
- Zudia, M. (2010). *Analisis Penilaian Kinerja Organisasi Dengan Menggunakan Konsep Balanced Scorecard Pada PT Bank Jateng Semarang*. Semarang: Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro.

Internet

- Dzakwan, S. (08 Maret 20017). *Jalan Kotawaringin Lama Jadi Bubur, Transportasi Dan Ekonomi Warga Lumpuh*. Diakses melalui <https://news.okezone.com/read/2017/03/08/340/1637052/> pada tanggal 23 November 2017 pukul 20.20 WIB
- Hidayat. (13 Desember 2016). *Anggaran Minim, Dinas PU Ajukan Peningkatan Status Jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama*. Diakses melalui <http://www.menaraneews.com/2016/12/pada> tanggal 23 November 2017 pukul 21.40 WIB.
- Maman, W. (30 Januari 2017). *Tidak Bisa Selesaikan Jalan Pangkalan Bun – Kolam, Kadis PU Lebih Baik Mundur*. Diakses melalui <https://beritasampit.co.id/2017/01/30/pada> tanggal 23 November 2017 pukul 16.45 WIB

<https://kobarkab.bps.go.id/> di akses pada tanggal 2 Mei 2018 pukul 18.40 WIB

Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 38 Pasal 5 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007.

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 47/PRT/M/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

Sumber Lain :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018.

Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016

Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016.

